



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2019 - 2023



“SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA”

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jualah maka Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dapat terselesaikan.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini disusun berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 50 serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *goodgovernance*.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan, adalah kecendrungan perubahan lingkungan yang berlangsung pesat, massive dan radikal. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan teknologi, hukum, bentuk dan jenis produk bisnis, ukuran-ukuran keberhasilan pelayanan yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan obyektif tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan aktualisasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik bilamana berada dalam koridor praktek operasional yang telah direncanakan dengan baik, meliputi:

1. Melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*);
2. Mengakses lingkungan internal dan eksternal Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
3. Mengatur aktivitas-aktivitas, proses utama dan sumber daya untuk mendukung misi yang terkait dengan *outcomes*;

Akhirnya saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023, semoga bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Palembang, 2019

SEKRETARIS DAERAH,



H. NASRUN UMAR
Pembina Utama (IV/e)
NIP.196206111989031012

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
I. PENDAHULUAN	1
II. GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH.....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	6
2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah.....	12
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	17
III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah.....	32
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	35
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	38
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, SDIG's dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	42
IV. TUJUAN DAN SASARAN	50
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	56
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN	101
VIII. PENUTUP	103

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Susunan Kepegawaian Biro-Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	11
Tabel 2.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	18
Tabel 2.2	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Setda Provinsi Sumatera Selatan	21
Tabel 3.1	Penentuan Kriteria Berdasarkan Bobot Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	48
Tabel 3.2	Penentuan Issue Strategis dan Penentuan Skor Nilai Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	49
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu dan Kelima	54
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	57
Tabel 6.1	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	60
Tabel 7.1	Program dan Target Sekretariat Daerah Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	101

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Restra Setda Provinsi Sumatera Selatan	1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari Perangkat Daerah mempunyai peran sentral dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, karena Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam rangka mendukung upaya perwujudan visi misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ini merupakan acuan bagi perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menetapkan strategi dan kebijakan yang tepat dan akurat agar tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dicapai.

Visi Provinsi Sumatera Selatan adalah ***Sumsel Maju Untuk Semua*** melalui misi-misi :

- Misi 1:** Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.
- Misi 2:** Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.
- Misi 3:** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi 4: Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Misi 5: Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Palembang, 2019

SEKRETARIS DAERAH,



H. NASRUN UMAR

Pembina Utama (IV/e)

NIP.196206111989031012

BAB I

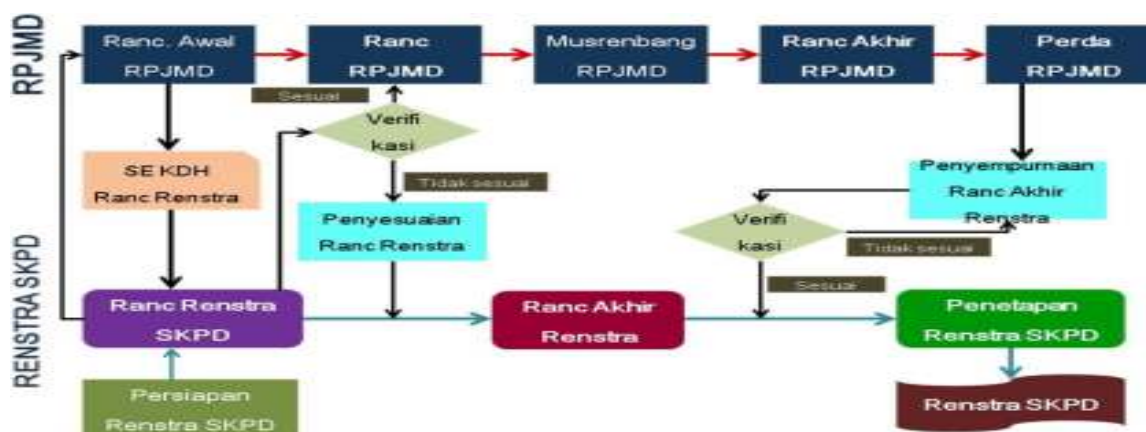
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang bertujuan dari pembuat keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan strategi yang bertujuan untuk menjadi pedoman dan strategis pencapaian tujuan kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2019–2023, sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, guna mendukung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Proses penyusunan Renstra Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 mengacu pada, sebagaimana Gambar 1.1. berikut ini,



Gambar 1.1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra Setda Provinsi Sumatera Selatan

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31);
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
 14. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 55) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Setda Provinsi Sumatera Selatan disusun sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Setda serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Setda
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu – Isu Strategi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten yaitu :

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari :

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Biro Kesejahteraan Rakyat

b. Asisten Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan yang terdiri dari :

1. Biro Perekonomian
2. Biro Administrasi Pembangunan
3. Biro Pengadaan Barang / Jasa

c. Asisten Administrasi dan Umum yang terdiri dari :

1. Biro Organisasi
2. Biro Umum dan Perlengkapan
3. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Biro-Biro di Sekretariat Daerah tersebut, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai Tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan dan otonomi daerah.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
 - b. penyiapan bahan penyelenggaraan layanan administrasi di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
 - c. penyelenggaraan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi pemerintahan;
 - d. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan dan otonomi daerah;
 - e. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, menyelenggarakan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi dan sumber daya di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum Kabupaten/Kota.

Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum Kabupaten/Kota;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan layanan administrasi di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum Kabupaten/Kota;
- c. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya aparatur di bidang produk hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum Kabupaten/Kota;
- d. pelaksana koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang produk hukum penyusunan peraturan

- perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia serta pembinaan hukum Kabupaten/Kota; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh pimpinan.
3. Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan, memberikan pelayanan administratif, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan tugas, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan administrasi dan sumber daya di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

Biro Kesejahteraan Rakyat Mempunyai Fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- d. penyelenggaraan administrasi pemerintahan di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- e. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana di bidang agama, kesejahteraan rakyat, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
4. Biro Perekonomian mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan.

Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan

- pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
 - c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pariwisata dan kesenian, industri dan perdagangan, penanaman modal, koperasi dan pengusaha kecil, eksplorasi laut, pertambangan, badan usaha milik daerah dan perhubungan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan, penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang administrasi pembangunan.
- Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
 - b. pengendalian pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
 - c. pengevaluasian bahan hasil pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
 - d. pengkoordinasian bahan pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya;
 - e. pelaporan bahan pelaksanaan pembangunan Provinsi, pembangunan antar daerah, pembangunan antar sektor dan pembangunan lainnya sebagai bahan perencanaan pembangunan selanjutnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

6. Biro Pengadaan Barang / Jasa mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang / jasa pada Pemerintah provinsi.

Biro Pengadaan Barang/Jasa mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan pengadaan barang/jasa;
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

7. Biro Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi, sumber daya manusia dan fasilitasi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, administrasi pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur.

Biro Organisasi mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
- b. penyelenggaraan koordinasi, penyusunan program kegiatan dan petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
- c. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemerintahan Provinsi di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, Pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur;
- d. penyelenggaraan pembinaan teknis, administratif dan sumber daya perangkat daerah di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, kepegawaian, pelayanan publik dan pembinaan serta peningkatan kinerja aparatur.
- e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah Kabupaten/Kota; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan

penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya manusia di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah.

Biro Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rumusan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis kebijakan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penatausahaan umum, perlengkapan, administrasi keuangan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
9. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan Provinsi dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan, pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik.

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan hubungan masyarakat, keprotokolan, pelayanan tamu dan dan informasi publik;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan administrasi perangkat daerah di bidang hubungan masyarakat, protokol pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang hubungan masyarakat dan protokoan, pelayanan tamu pimpinan dan informasi publik;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah

Sumber Daya Manusia yang merupakan aparatur yang ada di Biro-Biro Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1
Susunan Kepegawaian Biro-Biro Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina Tk.I (IV/b) = 3 Org	S2 = 2 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 1 Org
3.	Kepala Subbagian	Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = - Org
		Penata Tk.I (III/d) = 5 Org	S2 = 3 Org S1 = 2 Org	Laki-laki = 5 Org Perempuan = - Org
		Penata Muda Tk. I (III/c) = 1 Org	S2 = - Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = - Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 2 Org	S2 = 1 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
4.	Staf	Pembina Tk.I (IV/b) = 1 Org	S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Penata Tk.I (IV/a) = 2 Org	S2 = 2 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 1 Org	S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Penata (III/c) = 3 Org	S2 = 2 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 2 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 2 Org	S1 = 2 Org SLTA=1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Muda (III/a) = 3 Org	S1 = 1 Org SLTA=1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 2 Org
		Pengatur Tk.I (II/d) = 1 Org	SLTA = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Pengatur (II/c) = 2 Org	SLTP = 2 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org

2. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina Utama madya (IV/d) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki
2.	Kepala Bagian	Pembina Tk.I (IV/b) = 3 Org	S2 = 3 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 1 Org
3.	Kepala Subbagian	Pembina Tk.I(IV/b) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Pembina(IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Penata Tk. I (III.d) = 1 Org	S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Penata (III/c) = 4 Org	S2 = 4 Org	Perempuan = 4 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
4.	Staf	Pembina (IV/a) = 2 Org	S2 = 1 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 3 Org	S2 = 1 Org S1 = 2 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 1 Org
		Penata (III/c) = 5 Org	S2 = 3 Org S1 = 2 Org	Laki-laki = 4 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 4 Org	S1 = 1 Org SLTA = 3 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 3 Org
		Penata Muda (III/a) = 2 Org	S1 = 2 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
		Pengatur Muda Tk.I (II/b) = 1 Org	SLTA = 1 Org	Perempuan = 1 Org

3. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan.

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro Plt	Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina Tk I (IV/b) = 1 Org	S3 = 1 Org	Laki-laki = 3 Org
		Pembina (IV/a) = 2 Org	S2 = 2 Org	
3.	Kepala Subbagian	Penata Tk.I (III/d) = 7 Org	S2 = 2 Org S1 = 5 Org	Laki-laki = 7 Org
		Penata (III/c) = 1 Org	S1 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
4.	Staf	Pembina (IV/a) = 2 Org	S2 = 2 Org	Perempuan = 2 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 5 Org	S2 = 1 Org S1 = 4 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 4 Org
		Penata (III/c) = 8 Org	S2 = 2 Org S1 = 5 Org D3 = 1 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 6 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 9 Org	S2 = 1 Org S1 = 8 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 7 Org
		Penata Muda (III/a) = 4 Org	S1 = 2Orang D3 = 1 Org SLTA = 1 Org	Laki-laki = 3 Org Perempuan = 1 Org
		Pengatur (II/c) = 1 Org	SLTA = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Pengatur Muda Tk.I (II/b) = 1 Org	SLTA = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Penata Muda (II/a) = 1 Org	SLTA = 1 Org	Laki-laki = 1 Org

4. Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina Tk.I (IV/c) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina (IV/a) = 2 Org	S1 = 1 Org S2 = 1 Org	Laki-laki = 2 Org
3.	Kepala Subbagian	Pembina (IV/a) = 2 Org	S1 = 2 Org	Perempuan = 2 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 4 Org	S2 = 1 Org S1 = 3 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 2 Org
		Penata (III/c) = 1 Org	S1 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
4.	Staf	Pembina (IV.a) = 3 Org	S2 = 2 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 2 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 10 Org	S1 = 7 Org S2 = 3 Org	Laki-laki = 4 Org Perempuan = 6 Org
		Penata (III/c) = 4 Org	S1 = 3 Org DIII = 1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 3 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 8 Org	S1 = 3 Org SLTA = 5 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 7 Org
		Penata Muda (III/a) = 1 Org	SLTA = 1Org	Perempuan = 1 Org
		Pengatur (II/c) = 1 Org	SLTA = 1 Org	Perempuan = 1 Org

5. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina Utama Muda (IV/b) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki
2.	Kepala Bagian	Pembina Tk.I (IV/b) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 1 Org	S2= 1 Org	Perempuan = 1 Org
3.	Kepala Subbagian	Penata Tk.I (III/d) = 6 Org	S2 = 4 Org S1 = 2 Org	Laki-laki = 5 Org Perempuan = 1 Org
		Penata (III/c) = 3 Org	S2 = 2 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 3 Org
4.	Staf	Penata Tk.I (III/d) = 6 Org	S1 = 6 Org	Laki-laki = 6 Org
		Penata (III/c) = 3 Org	S2 = 2 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 6 Org	S2 = 2 Org S1 = 2 Org SLTA = 2 Org	Laki-laki = 4 Org Perempuan = 2 Org
		Penata Muda (III/a) = 2 Org	SLTA = 2 Org	Laki-laki = 3 Org
		Pengatur Muda Tk.I (II/b) = 1 Org	SLTP = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Penata Muda (II/a) = 1 Org	SLTA	Laki-laki = 1 Org

6. Biro Pengadaan Barang / Jasa Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina (IV/b) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-Laki = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina (IV/a) = 3 Org	S2 = 2 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 1 Org
3.	Kepala Subbagian	Penata Tk.I (III/d) = 4 Org	S2 = 1 Org S1 = 3 Org	Laki-laki = 3 Org Perempuan = 1 Org
		Penata (III/c) = 6 Org	S2 = 4 Org S1 = 3 Org	Laki-laki = 4 Org Perempuan = 3 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 1 Org	S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
4.	Staf	Pembina (IV/a) = 2 Org	S2 = 2 Org	Laki-laki = 2 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 4 Org	S2 = 2 Org S1 = 2 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 2 Org
		Penata (III/c) = 7 Org	S2 = 2 Org S1 = 5 Org	Laki-laki = 4 Org Perempuan = 3 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 25 Org	S2 = 6 Org S1 = 10 Org SLTA = 9 Org	Laki-laki = 13 Org Perempuan = 12 Org
		Penata Muda (III/a) = 35 Org	S1 = 31 SLTA = 4 Org	Laki-laki = 23 Org Perempuan = 12 Org
		Pengatur Tk. I (II/d) = 5 Org	DIII = 4 Org SLTA = 1 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 3 Org
		Pengatur (II/c) = 4 Org	SLTA = 4 Org	Laki-laki = 3 Org Perempuan = 1 Org
Pengatur Muda Tk.I (II/b) = 3 Org	SLTA = 3 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 1 Org		

7. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan.

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 Org	S2	Laki-laki
2.	Kepala Bagian	Pembina Tk.I (IV/b) = 3 Org	S2 = 2 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 1 Org
3.	Kepala Subbagian	Pembina (IV/a) = 3 Org	S2 = 3 Org	Laki-laki = 3 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 4 Org	S2 = 1 Org S1 = 3 Org	Laki-laki = 4 Org
		Penata (III/c) = 2 Org	S1 = 2 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
4.	Staf	Pembina Tk.I (IV/b) = 2 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 2 Org	S1 = 3 Org	Perempuan = 1 Org
		Penata (III/b) = 5 Org	S2 = 1 Org S1 = 4 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 4 Org
		Penata Muda (III/a) = 1 Org	SLTA = 1 Org	Laki-laki = 1 Org

8. Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina Tk.I (IV/b) = 1 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina Tk.I (IV/b) = 2 Org	S2 = 2 Org	Perempuan = 2 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 1 Org	S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
3.	Kepala Subbagian	Pembina (IV/a) = 2 Org	S2 = 1 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 3 Org	S2 = 3 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 1 Org
		Penata (III/c) = 2 Org	S2 = 2 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 2 Org	S1 = 2 Org	Laki-laki = 2 Org
4.	Staf	Pembina (IV/a) = 3 Org	S2 = 1 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 1 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 10 Org	S2 = 2 Org S1 = 8 Org	Laki-laki = 3 Org Perempuan = 7 Org
		Penata (III/c) = 16 Org	S2 = 8 Org S1 = 8 Org	Laki-laki = 9 Org Perempuan = 7 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 24 Org	S2 = 4 Org S1 = 14 Org	Laki-laki = 6 Org Perempuan = 12 Org
		Penata Muda (III/a) = 8 Org	S1 = 6 Org SLTA = 2 Org	Laki-laki = 7 Org Perempuan = 4 Org
		Pengatur Tk. I (II/d) = 9 Org	DIII = 3 Org SLTA = 6 Org	Laki-laki = 9 Org
		Pengatur (II/c) = 20 Org	SLTA = 20 Org	Laki-laki = 14 Org Perempuan = 6 Org
		Pengatur Muda Tk.I (II/b) = 7 Org	SLTA = 26 Org	Laki-laki = 4 Org Perempuan = 3 Org
		Pengatur Muda (II/a) = 7 Org	SLTA = 7 Org	Laki-laki = 5 Org Perempuan = 2 Org
		Juru Tk. I (I/d) = 1 Org	SLTP = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
		Juru (I/c) = 4 Org	SLTP = 4 Org	Laki-laki = 4 Org
		Juru Muda Tk.I (I/b) = 1 Org	SLTP = 1 Org	Laki-laki = 1 Org

9. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi Sumatera Selatan.

NO	JABATAN	PANGKAT/GOL	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1.	Kepala Biro	Pembina (IV/a) = 1 Org	S2 = 1 Org	Perempuan = 1 Org
2.	Kepala Bagian	Pembina (IV/a) = 3 Org	S2 = 2 Org S1 = 1 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 1 Org
3.	Kepala Subbagian	Penata Tk.I (III/d) = 4 Org	S2 = 1 Org S1 = 3 Org	Laki-laki = 3 Org Perempuan = 1 Org
		Penata (III/c) = 7 Org	S2 = 4 Org S1 = 3 Org	Laki-laki = 4 Org Perempuan = 3 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 1 Org	S1 = 1 Org	Laki-laki = 1 Org
4.	Staf	Pembina (IV/a) = 2 Org	S2 = 2 Org	Laki-laki = 2 Org
		Penata Tk.I (III/d) = 4 Org	S2 = 2 Org S1 = 2 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 2 Org
		Penata (III/c) = 7 Org	S2 = 2 Org S1 = 5 Org	Laki-laki = 4 Org Perempuan = 3 Org
		Penata Muda Tk. I (III/b) = 25 Org	S2 = 6 Org S1 = 10 Org SLTA = 9 Org	Laki-laki = 13 Org Perempuan = 12 Org
		Penata Muda (III/a) = 35 Org	S1 = 31 SLTA = 4 Org	Laki-laki = 23 Org Perempuan = 12 Org
		Pengatur Tk. I (II/d) = 5 Org	DIII = 4 Org SLTA = 1 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 3 Org

	Pengatur (II/c) = 4 Org	SLTA = 4 Org	Laki-laki = 3 Org Perempuan = 1 Org
	Pengatur Muda Tk.I (II/b) = 3 Org	SLTA = 3 Org	Laki-laki = 2 Org Perempuan = 1 Org
	Pengatur Muda (II/a) = 14 Org	S1 = 1 Org SLTA = 13 Org	Laki-laki = 9 Org Perempuan = 5 Org
	Juru (I/c) = 2 Org	SLTP = 2 Org	Laki-laki = 1 Org Perempuan = 1 Org
	Juru Muda Tk.I (I/b) = 1 Org	SLTP = 1 Org	Laki-laki = 1 Org

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

2.3.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Target

Di bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada periode renstra sebelumnya (2013-2018). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Sekretariat Daerah pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama. Dalam penetapan target selama 5 tahun terhitung dari tahun 2013 s.d 2018 terjadi perubahan target pada tahun 2017 dan 2018 terjadi perubahan terhadap target yang telah ditetapkan pada Perda Nomor 9 Tahun 2014, perubahan target tersebut disebabkan adanya pertimbangan sumber daya yang dimiliki atau penyesuaian anggaran, perubahan target tertuang pada Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	1 (2014)	2 (2015)	3 (2016)	4 (2017)	5 (2018)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang profesional	Meningkatnya kinerja manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat di akses oleh publik	Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)		ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	ST (Sangat Tinggi)	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	
			Penyampaian LKPJ dan RLPPD Pemerintah Prov. Sumsel yang tepat waktu		3 buku LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Buku LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 buku LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Buku LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Buku LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Buku LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Buku LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Dok LKPJ dan 10 buku RLPPD	3 Buku LKPJ dan 10 buku RLPPD	100%	100%	100%	100%	100%	
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi di bidang pemerintahan dan	Persentase Pelayanan Kedinasan yang difasilitasi sesuai dengan SOP		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya koordinasi dan pelaksanaan perumusan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah Pemekaran Kabupaten dan Kecamatan yang difasilitasi		3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	3 Kec	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Pilar Batas Daerah yang terpasang		6 Pilar	60Pilar	60Pilar	60 Pilar	60Pilar	6 Pilar	60Pilar	60Pilar	60 Pilar	60 Pilar	60 Pilar	100%	100%	100%	100%	100%
			Jumlah Kabupaten Pemekaran yang telah memiliki infrastruktur sesuai standar		3 Kab	3 Kab	3 Kab	3 Kab	3 Kab	3 Kab	3 Kab	3 Kab	3 Kab	3 Kab	3 Kab	100%	100%	100%	100%	100%

2			Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/ BUMN/ BUMD dan Lembaga Non		20 MoU	30 MoU	35 MoU	40 MoU	45 MoU	18 MoU	20 MoU	25 MoU	35 MoU	40 MoU	10 Mou	12 Mou	14 Mou	16 Mou	18 Mou			
3	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang profesional	Meningkatnya kinerja manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat diakses oleh publik	Jumlah Peraturan yang dapat diakses oleh publik		10 Perda	10 Perda	11 Perda	12 Perda	13 Perda	22 Perda	11 Perda	18 Perda	21 Perda	8 Perda	220%	110%	163,67%	175%	61,54%			
			Jumlah Peraturan Gubernur yang dapat diakses oleh publik		30 Pergub	32 Pergub	37 Pergub	12 Perda	13 Perda	22 Perda	11 Perda	18 Perda	21 Perda	8 Perda	220%	110%	163,67%	175%	61,54%			
			Jumlah perkara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang selesai		30 Perkara	4 Perkara	5 Perkara	6 Perkara	7 Perkara	14 Perkara	25 Perkara	41 Perkara	14 Perkara	14 Perkara	466%	625%	820%	233%	200%			
4	Persentase Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang di fasilitasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dibidang Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatnya Koordinasi Bidang Perekonomian Daerah	Jumlah dokumen kebijakan pembinaan koperasi dan UMKM, Pertanian dan Sumber Daya Alam serta TPID																			
			Jumlah dokumen administrasi perkantoran dan kebijakan pembinaan LHK, serta monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan		100%	100%	100%	100%	100%	80%	85%	90%	95%	100%	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00			
			jumlah BUMD yang dibina dan dievaluasi																			
			jumlah dokumen informasi investasi daerah jumlah kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah																			

6	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Capaian Target Program Kegiatan APBD/APBN	Jumlah realisasi Kegiatan APBD/APBN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100	100
8	Persentase Laporan yang dikelola	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah	Jumlah Dokumen LkjIP Prov. Sumsel		76	78	80	82	84	70,66	75,11	80,01	78,71	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penetapan Peraturan per Undang-Undangan yang sesuai ketentuan yang			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase PD yang telah menyusun anjab ABK	Jumlah PD yang telah membuat Anjab ABK			80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah Pelayanan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Setda Prov.				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Setda Prov. Sumatera Selatan

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2) 2014	(3) 2015	(4) 2016	(5) 2017	(6) 2018	(7) 2014	(8) 2015	(9) 2016	(10) 2017	(11) 2018	(12)	(13) 2014	(14) 2015	(15) 2016	(16) 2017	(17) 2018	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	347.140.000	502.622.800	502.622.800	869.305.015	1.022.035.019	347.140.000	502.622.800	502.622.800	869.305.015	1.022.035.019	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0	250.000.000,-	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah	837.860.000	347.620.000	178.043.600	30.000.000	150.000.000	790.860.000	345.620.000	175.043.600	28.679.425	127.979.900	15,27	36,82	71,88	23,59	85,32	16,18	
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	575.000.000	660.200.000	1.886.409.420	1.100.000.000	2008131000	500.000.000	659.200.000	1.856.309.420	1.028.368.230	1.662.091.998	28,96	25,18	88,11	15,11	82,77	33,24	
Program Penataan Daerah Otonom Baru	275.000.000	188.000.000	48957700	2.359.000.000	2.750.000.000	268.000.000	186.000.000	47.957.700	2.320.988.285	2.646.944.377	96,25	25,18	88,11	11,22	96,25	98,76	
Program Kerjasama Wilayah Perbatasan	593.000.000	705.000.000	202.914.280	250.000.000	525.000.000	590.000.000	703.000.000	202.614.280	248.524.700	478.685.333	80,72	67,90	23,59	19,14	91,18	81,13	
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.990.000.000	2.713.300.000	1.263.100.000	1.278.255.000	1.450.400.000	2.244.819.149	2.194.452.319	1.236.426.898	1.178.858.367	1.307.287.682	75%	80,8 %	97,8 %	92,2 %	90,1 %	0%	0%
Biro Kesra	4.663.639.000	9.360.129.000	3.136.055.000	2.016.365.500	2.900.501.000	4.440.888.940	3.461.479.415	3.043.293.050	1.771.289.999	2.191.129.063	95%	37%	97%	88%	82%	-445.034.500	-562.439.969
Program Pembangunan Bidang Ekonomi	-	1.067.430.000	1.125.954.050	722.000.000	866.000.000	-	1.022.875.500	1.103.622.314	553.923.347	828.833.481	-	0,96	0,98	0,77	0,96	945.346.013	877.313.661

*) diisi dengan nama Perangkat Daerah

**) diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

***) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

Pencapaian Indikator Kinerja dari tahun 2014 –2018 secara kuantitatif adalah sebagai berikut:

1. Capaian Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Persentase penyampaian Nilai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan **Tahun 2014 ditargetkan dengan nilai (2,6), Tahun 2015 ditargetkan dengan nilai (2,7), Tahun 2016 ditargetkan dengan nilai (2,8), Tahun 2017 ditargetkan dengan nilai (2,9) dan Tahun 2018 ditargetkan dengan nilai (3,0).**Target ditahun 2018 dengan nilai 3 sedangkan realisasinya 0. Hal ini dikarenakan Laporan Penyusunan Pemerintah Daerah (LPPD) masih disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tentang Capaian Hasil Peringkat LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota baru akan keluar ditahun 2019 mendatang.

Capaian Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 s.d 2018 yaitu :

Tabel Capaian Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik dari Tahun 2014-2018

TAHUN	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
1	2014	Informasi	-	-
2	2015	Informasi	60	70,40
3	2016	Informasi	65	87,34
4	2017	Informasi	70	59,88
5	2018	Informasi	75	-

2. Capaian Indikator Kinerja Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota /Swasta / BUMN/ BUMD dan Lembaga Non Pemerintah.

Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten /Kota /Swasta /BUMN /BUMD dan Lembaga Non Pemerintah tahun 2017 ditargetkan 100% dan terealisasi 100%.

3. Capaian indikator Kinerja Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang dapat diakses oleh Publik

1. Target Peraturan Daerah pada tahun 2018 target 13 (tiga belas) perda dan realisasinya adalah 8 (delapan) Peraturan Daerah yang kesemuanya dapat diakses oleh publik, jumlah tersebut mencapai angka 61,5% dari target yang ditetapkan. Kesemua peraturan daerah

dimaksud dapat diakses oleh publik melalui website www.jdih.sumselprov.go.id.

2. Peraturan Daerah pada Tahun 2014 target sebesar 10 (sepuluh) realisasi 22 (dua puluh dua), Tahun 2015 target sebesar 11 (sebelas) realisasi 11 (sebelas), Tahun 2016 target sebesar 12 (dua belas) realisasi 18 (delapan belas), Tahun 2017 target sebesar 13 (tiga belas) realisasi 21 (dua puluh satu) dan untuk Tahun 2018 target sebesar 13 (tiga belas) dan realisasi sebesar 8 (delapan).

4. Capaian indikator kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang di Fasilitas

Persentase kegiatan Bidang Kesejahteraan rakyat yang difasilitasi tahun 2018 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% yang terdiri dari 1 program dan 2 kegiatan yang menunjang indikator ini. Adapun program dan kegiatan sebagai berikut :

Program Perumusan Kebijakan di Bidang Keagamaan

1. Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi.
2. Pemberangkatan Kafilah MTQ/STQ ke Tingkat Nasional.

5. Capaian indikator Kinerja Persentase Informasi Bidang Perekonomian yang dapat di Akses Publik

Capaian Indikator jumlah informasi bidang perekonomian yang dapat diakses publik selama 5 tahun dari Tahun 2014 s.d 2018 sebesar 1 dokumen setiap tahunnya. Keberhasilan pencapaian Indikator Jumlah Informasi Perekonomian yang dapat di akses oleh publik di dukung oleh :

1. Adanya Media Informasi melalui Pusat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Provinsi Sumatera Selatan.
2. Adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi terkait lainnya.

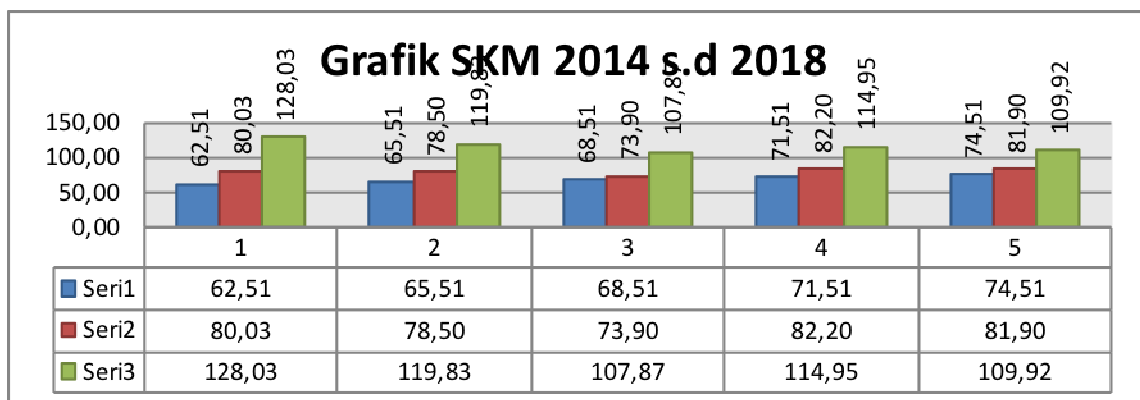
Untuk mendukung indikator tersebut di atas, telah di programkan kegiatan berikut upaya yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

- I. Program Pembangunan Bidang Ekonomi dengan kegiatan.
 1. Pemantauan dan Evaluasi Sektor Pertambangan.
 2. Pemantauan dan Evaluasi Sektor Industri dan Perdagangan.
 3. Pemantauan dan Evaluasi Sektor Koperasi dan UKM.

4. Pemantauan dan Evaluasi Sektor Pertanian.
5. Pemantauan dan Evaluasi Sektor Perikanan dan Kelautan.
6. Pemantauan Sektor Lingkungan Hidup Limbah B3 Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pemantauan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan.
8. Pemantauan dan Pengawasan Sektor Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Pemantauan Pelaksanaan CSR di Sekitar Perusahaan untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat.
10. Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah se-Sumatera Selatan.
11. Pemantauan Evaluasi Lintas Sektoral Pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) untuk Peningkatan Akses Permodalan di Sumatera Selatan.
12. Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

6. Capaian indikator Kinerja Survei Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan sosialisasi penerapan Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, namun metode survei dilakukan secara mandiri dengan cara penyebaran kuesioner pertanyaan ke pengguna layanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.



Capain kinerja Survei Kepuasan Masyarakat pada tahun sebelumnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan sosialisasi penerapan Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, namun metode survei dilakukan secara mandiri dengan cara penyebaran kuesioner pertanyaan ke pengguna layanan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Telah dilakukan terhadap pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan oleh OMBUDSMAN di Provinsi Sumatera Selatan dengan predikat (zona hijau) kepatuhan tinggi.

Strategi Pemecahan Masalah :

1. Melakukan Survey eksternal pelayanan publik dengan melibatkan lembaga lain seperti: OMBUDSMAN RI, Badan Pusat Statistik, Perguruan Tinggi dan lembaga lainnya terkait pelayanan publik.
2. Pembangunan Sistem Pelayanan Publik berbasis Elektronik *E-SKM*.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan menjadi lebih baik sebagai berikut :

1. Peningkatan perbaikan mutu dan optimalisasi penyelenggaraan semua jenis pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan guna mewujudkan Pelayanan Prima di Lingkungan Pemerintah.
2. Perlunya inovasi - inovasi Pelayanan Publik dengan pendekatan, prosedur, metode maupun Struktur Organisasi Pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Aktif melakukan sosialisasi dan rapat monitoring pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di SKPD/Unit Pelayanan Publik serta bagaimana tindak lanjut dari setiap unsur terendah.

7. Capaian indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Capaian nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

No.	Tahun	Nilai Angka	Kategori	Interprestasi
1.	2014	70,66	B	Baik
2.	2015	75,11	BB	Sangat Baik
3.	2016	76,19	BB	Sangat Baik
4.	2017	80,01	A	Memuaskan
5.	2018	78,71	BB	Sangat Baik

Capaian indikator Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2014 s.d 2018 berdasarkan grafik diatas terlihat peningkatan dari tahun ke tahun sejak 2014 s.d 2017 nilai SAKIP Provinsi Pemerintah Sumatera naik secara signifikan pada tahun 2017, hal ini menegaskan bahwa nilai SAKIP Provinsi Sumatera Selatan melebihi target yang telah ditentukan dengan nilai A yaitu 80,01 (sangat baik) dengan akuntabilitas kinerjanya baik, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen yang andal, menggunakan *knowledge management* untuk membangun budaya berkinerja, dan banyaknya inovasi, terjadinya peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017 dikarenakan :

1. Adanya Keselarasan kinerja Perangkat Daerah.
2. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya.
3. Anggaran termanfaatkan secara efektif dan efisien serta capaian reformasi birokrasi.
4. Inefisiensi anggaran dapat dicegah
5. Keberhasilan pembinaan kepada Kabupaten/Kota.
6. Adanya kerjasama antara BAPPEDA, Inspektorat dan Biro Organisasi.

Pada tahun 2018 nilai SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan, hal ini terjadi karena tingkat pemahaman Kepala Perangkat Daerah terhadap manajemen Kinerja masih belum optimal dan masih belum memahami pentingnya SAKIP. Perlu adanya perbaikan kedepan serta perlu adanya pemahaman Kepala Daerah mengenai SAKIP. Adapun penyebab penurunan nilai SAKIP yaitu Kepala Daerah kurang memahami tugas dan fungsi dalam organisasi yang di pimpin.

Upaya – upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk meningkatkan nilai SAKIP kedepan yaitu :

1. Melakukan Bimbingan teknis kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk meningkatkan SAKIP.
2. Melakukan Pembinaan kepada Kabupaten/Kota.
3. Melakukan Bimbingan Teknis bagi petugas pengemban SAKIP.
4. Membentuk SATGAS TIM SAKIP antara BAPPEDA, Inspektorat dan Biro Organisasi.

8. Capaian Jumlah PD yang telah Memiliki Struktur Organisasi yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Persentase PD yang telah memiliki struktur organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Tahun 2018 ditargetkan 50 (lima puluh) Perangkat Daerah dan terealisasi 50 (lima puluh) Perangkat Daerah (100%).

9. Capaian Jumlah Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Persentase Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada tahun 2018 sebesar 30% dan terealisasi sebesar 25%. Terdapat 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah, 8 (delapan) Biro, Asisten dan 3 (tiga) staf ahli yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang harus dilakukan Analisis Jabatan dan Analisis beban Kerjanya.

10. Capaian indikator Kinerja Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal

Capaian persentase fasilitasi sarana dan prasarana yang optimal pada tahun 2018 ditargetkan 100% dan terealisasi 100%. Capaian indikator kinerja tahun 2018 pada Sekretariat Daerah telah terselenggara dengan baik tugas pokok dan fungsi dari Biro dengan baik dan lancar sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Program pada Tahun 2018 yang dilaksanakan untuk mewujudkan indikator ini adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp. 33.121.687.960,- dengan realisasi sebesar Rp. 32.641.819.696,- atau 99,97% dan realisasi kinerja fisik tercapai sebesar 100%.

11. Capaian indikator Kinerja dari sasaran yang meningkatnya kerja manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat diakses oleh publik

Sasaran nilai keterbukaan informasi publik Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 baru di jalankan/kegiatan baru yang dilaksanakan pada tahun 2015 dengan Sasaran/target sebesar 60% persen, realisasi sebesar 70,40% dan tingkat capaian sebesar 117,33%, tahun 2016 dengan sasaran sebesar 65%, realisasi sebesar 87,34 dan tingkat capaian 134,37% dan berjalan sampai dengan Tahun 2017 ditargetkan/sasaran 70%, realisasi sebesar 59,88% dengan tingkat capai 85,54% sedangkan di tahun 2018 dengan target/Sasaran sebesar 75% tidak terealisasi dikarenakan pengalihfungsian ke Dinas Informasi dan komunikasi, sedangkan Biro Humas

dan Protokol sebagai penguatan Pejabat Pengelola informasi Nilai keterbukaan informasi publik Provinsi Sumatera Selatan oleh Komisi Informasi Pusat yaitu Amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dimana UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik secara benar dan transparan.

2.3 Capaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Capaian Kinerja Keuangan dari segi Anggaran dan Realisasi trendnya semakin meningkat dari tahun ke tahun yang terkait dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, secara umum rasio realisasi kurang dari 100%.

Dari target RPJMD Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018, telah dilaksanakan program/ kegiatan prioritas yang didanai APBD Provinsi Sumatera Selatan. Rata – rata rasio pencapaian pertahun adalah 1, artinya pencapaian indikator kinerja telah 100%, walaupun ada beberapa rasio yang turun, tapi dapat tertutupi dengan pencapaian tahun berikutnya yang over target, Secara keseluruhan, sudah menggambarkan hasil yang optimal. Secara keseluruhan target RPJMD dari tahun 2013 – 2018, secara kumulatif realisasi sudah mencapai 100%.

a. Penghargaan yang telah diterima

Keberhasilan di bidang Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Inovasi yang amat menonjol selama periode 2013 – 2018 adalah mendapat penghargaan :

1. **Silamsat** Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan sebagai **TOP 35 Inovasi Pelayanan Publik Terbaik di Indonesia** dari KemenPAN & RB tahun 2014.
2. SAKIP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Kategori “A”.
3. Provinsi terbaik pendukung Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Pengukuran pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat secara langsung dihitung dengan membandingkan dengan indikator makro pembangunan Sumatera selatan, karena hasil-hasil Sekretariat Daerah merupakan langkah awal sebelum memasuki perencanaan pembangunan. Penilaian final menyangkut indikator makro baru dapat dilakukan apabila hasil-hasil yang berupa rekomendasi sebagai bahan kebijakan sudah diaplikasikan oleh Perangkat Daerah terkait.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah dan Pengembangan Daerah

Tujuan utama pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam merumuskan kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus menggunakan data yang akurat dan terkini sehingga perencanaan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan pengembangan pelayanan Penelitian dan Pengembangan Daerah dihadapkan dengan beberapa tantangan.

Tantangan pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah :

- A. Tantangan Internal dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Disiplin kerja pegawai masih kurang maksimal.
 - 2) Sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang belum maksimal.
 - 3) Kualitas data dan sistem informasi serta pelaporan pada bidang ekonomi dan pembangunan belum maksimal.
 - 4) Budaya ego sektoral relatif masih tinggi.
- B. Tantangan Eksternal dalam pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin meningkat dan beragam.

Keterbukaan telah mendorong masyarakat untuk berpikir kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan termasuk pemerintahan daerah. Tuntutan masyarakat akan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) memaksa penyelenggara pemerintahan untuk semakin mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan serta kemasyarakatan. Sikap kritis masyarakat tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan. Selain itu, tantangan yang berat dimana saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin lemah terutama dalam penegakan hak asasi manusia, lingkungan hidup, penegakan hukum, pelayanan publik dan pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

- b. Peraturan perundang-undangan pemerintah pusat sering tidak selaras Integrasi dan konsistensi serta perubahan peraturan perundang-undangan menjadi tantangan lain yang harus dihadapi dan disiasati. Banyak peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan tidak terintergrasi serta seringnya mengalami perubahan membuat aparat peneliti sering kali mengalami kegamangan dan disorientasi.
- c. Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Daya Saing Daerah
Menghadapi dinamika perubahan yang cepat dan semakin kompleks, upaya peningkatan daya saing sangat bertumpu pada kemampuan berinovasi berbagai pihak pada berbagai dimensi dan tataran. Oleh karena itu, upaya peningkatan daya saing perlu semakin diprioritaskan melalui penguatan sistem inovasi. Rendahnya budaya Inovasi dikalangan masyarakat dan akademisi menjadi satu tantangan tersendiri bagi Provinsi Sumatera Selatan dalam pengembangan pelayanan, untuk mewujudkan *one agency one innovation*.

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah terdapat peluang yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. Peluang Internal Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pelayanan Sekretariat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah dan kemampuan SDM terkait analisis data.
2. Suasana kerja pada bidang Ekonomi dan Pembangunan yang demokratis dan dinamis.

Sarana dan prasarana kerja pada bidang Ekonomi dan Pembangunan yang memadai :

1. Terbukanya peluang kerjasama bidang ekonomi dan pembangunan dengan pihak lain.
2. Peran bidang Ekonomi dan Pembangunan dalam mendukung Instansi (Sekretariat Daerah) untuk merumuskan kebijakan cukup baik.

B. Peluang Eksternal Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Daerah Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Banyak permasalahan di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Keuangan, Pembangunan serta Politik dan Kemasyarakatan.

2. Adanya Peraturan Perundangan-undangan sebagai pedoman dalam melakukan pekerjaan.
3. Dukungan Perangkat Daerah dalam Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Pembentukan Tim Pokja dalam pembuatan Reformasi Birokrasi.
5. Adanya Biro Pengadaan Barang/Jasa menjadi tempat satu pintu dalam pelaporan pembelian barang atau jasa.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Dengan memperhatikan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, Isu strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disampaikan belum optimal (karena SDM yang membidangnya sering berubah).
2. Pelaksanaan kerjasama daerah di Provinsi Sumatera Selatan belum berjalan dengan baik dikarenakan Perangkat Daerah belum mengetahui /memahami arti kerjasama daerah.
3. Sulitnya mencari kesepakatan mengenai batas daerah antara Kabupaten/Kota dikarenakan adanya potensi Sosial ekonomi didaerah perbatasan.
4. Belum optimalnya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten/Kota dikarenakan belum adanya pelimpahan wewenang kepala daerah (Bupati/Walikota) di bidang pelayanan publik di kecamatan.
5. Belum terlaksananya pembangunan di kelurahan yang sesuai dengan Kemendagri RI Nomor 130 Tahun 2018 sehingga pelaksanaan pembangunan di kelurahan belum optimal.
6. Belum optimalnya penyebaran informasi produk Hukum pada jaringan anggota.
7. Tenaga penyusun perancangan peraturan perundang-undangan belum tersedia di Perangkat Daerah.
8. Belum optimalnya cara penulisan pembakuan Rapergub di Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Belum Optimalnya draf Raperda/Perda/Kabupaten/Kota untuk diklarifikasi/evaluasi.
10. Peraturan Pemerintah tentang Bantuan Hukum belum ada.
11. Kurangnya pemahaman yang sama tentang kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat.
12. Belum optimalnya Perumusan Kebijakan Bidang Kesra.
13. Masih kurangnya akses masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan mengenai Tahfidz Al-Qur'an dan seni baca tulis huruf Al-Qur'an.

14. Belum optimalnya dukungan terhadap peran Lembaga Pendidikan Tilawatil Al-Qur'an (LPTQ) Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
15. Belum optimalnya dukungan terhadap peran Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP. UKS) Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
16. Belum optimalnya dukungan dan peran Lembaga Seni Qasidah (LASQI) Provinsi dan Kab/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
17. Belum optimalnya Monitoring dan Pelaporan Bidang Ekonomi.
18. Belum maksimalnya Evaluasi Data Program Bidang Ekonomi.
19. Koordinasi PD masih belum maksimal dalam mensinergikan kebijakan Nasional dengan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
20. Belum Optimalnya Koordinasi Tim Percepatan Pengembangan Perekonomian Daerah (TFPED), dalam memberikan pandangan dan saran, masukan dan kritik secara objektif secara rasional atas persoalan Pengembangan Ekonomi daerah.
21. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah belum sepenuhnya mengacu pada perencanaan dan target yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran, sehingga seringkali terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran yang mengakibatkan kualitas dan kuantitas kegiatan tidak berhasil guna dan berdaya guna maksimal.
22. Adanya perbedaan laporan realisasi keuangan dan realisasi fisik pada beberapa Perangkat Daerah dan Satker antara laporan yang disampaikan ke Biro Administrasi Pembangunan, Bappeda dan BPKAD.
23. Rendahnya kemampuan ASN dalam penyusunan perencanaan, hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kemampuan ASN dalam menyusun indikator kinerja yang tepat, sehingga menyulitkan dalam proses pelaporan dan monitoring serta evaluasi organisasi.
24. Terbatasnya Jafung pengadaan barang dan jasa.
25. Kelengkapan dokumen-dokumen Reformasi Birokrasi belum tersusun. dan belum terbentuk Tim Penilaian Angka Kredit Jafung pengadaan barang dan jasa.
26. Masih kurangnya Kontribusi BUMD terhadap PAD Provinsi Sumatera Selatan.
27. Hasil kegiatan masih berorientasi pada output dan belum memperhatikan hasil dan dampaknya terhadap masyarakat.

28. Monitoring capaian kinerja pada masing-masing IKU Provinsi belum di pantau secara berkala.
29. Kelengkapan Database Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal belum optimal.
30. Belum dilakukan kerja sama pelaksanaan survei external pelayanan publik (SKM) dengan melibatkan lembaga lain seperti ombudsman perwakilan, perguruan tinggi dan LSM.
31. Pemahaman untuk pelaksanaan penginputan data *e-performance* belum optimal.
32. Pemahaman Kepala Dinas terhadap SAKIP masih belum Optimal.
33. Kualitas terhadap Pohon Kinerja Perangkat Daerah masih belum Optimal
34. Penyusunan SOP belum sesuai dengan ketentuan Permenpan Nomor 35 Tahun 2012.
35. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan Perangkat Daerah.
36. Pemahaman untuk memenuhi kelengkapan dokumen-dokumen pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku belum dilaksanakan secara optimal.
37. Koordinasi data-data kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum maksimal.
38. Pemenuhan dokumen-dokumen pelayanan publik belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
39. Monitoring dan Evaluasi belum menjadi kebutuhan mendasar dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk perbaikan kinerja, hal ini dapat dilihat dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan lainnya yang masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administrasi saja.
40. Monitoring capaian kinerja pada masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi belum di pantau secara berkala.
41. untuk pelaksanaan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tindak lanjut dalam perbaikan kualitas unit pelayanan publik belum optimal.
42. Program dan kegiatan yang diusulkan Perangkat Daerah terkait dari Kabupaten/Kota belum secara keseluruhan diakomodir oleh Perangkat Daerah Provinsi terkait.
43. Lemahnya implementasi data indeks hidup layak dan produktivitas di lapangan.
44. Lemahnya implementasi indeks KHL di lapangan.
45. Masih kurangnya pendanaan pembangunan dan pengembangan kota terpadu mandiri di Sumatera Selatan

46. Lemahnya Koordinasi antar Sektor terkait Hubungan Kerjasama
47. Pemahaman Perangkat Daerah terhadap Peraturan Perundangan di bidang Perangkat Daerah belum optimal.
48. Koordinasi dengan analis Perangkat Daerah belum maksimal.
49. Perangkat Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang belum optimal.
50. Pemahaman mengenai RKA pada internal Perangkat Daerah belum optimal.
51. Pemahaman mengenai DPA belum optimal.
52. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pengamanan informasi strategis.
53. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Administrasi dan Birokrasi yang ada di Lingkungan Setda Provinsi Sumatera Selatan.
54. Susahnya koordinasi ketika ada kunjungan Pejabat Negara.
55. Belum adanya pembagian tugas yang jelas pada ruang tamu pimpinan, griya agung, VIP Room Bandara dan SMB II Palembang.
56. Pelaksanaan pekerjaan perbaikan ada yang tidak sesuai dengan rencana/RAB yang telah dibuat pada ruang tamu pimpinan, griya agung, VIP Room Bandara dan SMB II Palembang.
57. Banyaknya barang dan aset yang sudah berusia, Sehingga tidak ekonomis lagi.
58. Banyaknya kendaraan yang telah berusia sehingga tidak ekonomis lagi.
59. Kualitas aparatur keuangan yang masih Kurang.
60. Tanggung jawab kerja & disiplin aparatur keuangan yang masih Kurang.
61. Kurangnya SDM keuangan yang berkualitas.
62. Permohonan mengenai penatausaha keuangan pada internal Perangkat Daerah belum optimal.
63. Pemahaman mengenai Renja pada internal Perangkat Daerah belum optimal.
64. Pemahaman mengenai RKA pada internal Perangkat Daerah belum optimal.
65. Pemahaman mengenai DPA belum optimal.
66. Kelengkapan dokumen-dokumen Reformasi Birokrasi belum tersusun dan Tim Pokja belum terbentuk.
67. Pemenuhan dokumen-dokumen pelayanan publik belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
68. Pemahaman mengenai RKA pada internal PD belum optimal.
69. Pemahaman mengenai DPA belum optimal Keterlambatan Transformasi data melalui media Internet.

70. Sulitnya menentukan kualifikasi perusahaan pers, lemahnya koordinasi antar berbagai sektor terkait pemutahiran data media.
71. Sulitnya menghitung volume pelaksanaan kegiatan dan sering berubahnya acara dalam pelayanan tamu pimpinan.
72. Kurangnya koordinasi antar PD dalam mendistribusikan barang-barang media cetak humas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2019-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah: **SUMATERA SELATAN MAJU UNTUK SEMUA** Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019-2023 sebagai berikut: Sumsel maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat. Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel. Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sumsel Maju untuk Semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat

yang menghargai perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat-pusat kebudayaan.

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Misi 1 : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi 4 : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah

Misi 5 : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang, bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses Tata kelola Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan turut bertanggungjawab dalam mewujudkan Kelima misi pembangunan tersebut. Disamping itu, eksistensi Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah pendukung kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa Perangkat Daerah yang mendukung terealisasinya misi ketiga, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif memiliki tolok ukur indeks reformasi birokrasi, yang mana sarasanya adalah tata kelola pemerintahan yang meningkat. Peningkatan ini ditandai dengan

meningkatnya nilai akuntabilitas kinerja pemerintah dan opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang wajar tanpa pengecualian. Dalam konteks ini maka peningkatan kualitas kinerja penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah merupakan faktor kunci tercapainya misi tersebut.

Sekretariat Daerah berperan penting dalam pencapaian setiap misi yang ingin dicapai ditingkat daerah dalam lima tahun kedepan.

Misi 1 : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Pada Misi Ketiga : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi Kelima : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Dari uraian diatas dapat ditelaah beberapa permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Visi dan Misi Kepala Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, antara lain :

- 1) Keterbatasan data dan Pembuatan Laporan.
- 2) Belum memadainya jumlah SDM serta kompetensi.
- 3) Masih terdapatnya proporsi bidang tugas yang tumpang tindih antara fungsi utama dengan fungsi penunjang maupun fungsi tambahan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Visi Sumsel Maju untuk semua”. Upaya untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sebuah sistem yang memungkinkan terjadinya proses inovasi secara menyeluruh, hal ini harus didukung oleh Komitmen Pimpinan yang membantu kelancaran dalam melakukan perubahan.

Adapun faktor penghambat dan faktor pendorong dari Pelayanan Sekretariat Daerah yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah, yaitu :

a. Faktor Penghambat:

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sekretariat Daerah yang masih terbatas. Masalah ini sangat *crusial*, karena SDM yang ada sangat kurang untuk menunjang kegiatan dalam pembuatan laporan dan kebijakan untuk mewujudkan Misi Ketiga, masih banyak staf yang latar pendidikannya tidak sesuai tupoksi, ditambah lagi dengan banyaknya SDM yang mendekati masa pensiun.
- 2) Belum optimalnya dalam penyusunan SOP Sekretariat Daerah.
- 3) Sinergi ABG (Akademisi, Bisnis dan *Government*)
- 4) Masih terdapat ego sektoral pada masing-masing Biro yang dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar program.
- 5) Proses penyusunan kebijakan masih belum didasarkan pada orientasi hasil dengan kata lain belum dijadikan landasan/rekomendasi dalam perumusan kebijakan pengembangan dan pembangunan daerah.

b. Faktor Pendorong

- 1) Tupoksi Sekretariat Daerah sebagai lembaga resmi Pemerintah Daerah yang mempunyai tupoksi Pembuat kebijakan, yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat.
- 2) Motivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja.
- 3) Adanya Tim Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Sumatera Selatan melalui Agenda Riset Daerah (ARD) tahun 2019-2023 yang memberikan masukan kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyusun kegiatan maupun rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan atau Kepala Daerah.
- 4) Masukan ide/gagasan dari Staf Tenaga Ahli Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dalam proses perumusan kebijakan – kebijakan strategis daerah.
- 5) Terbentuknya kerjasama jaringan pada Perangkat Daerah untuk membantu terwujudnya kebijakan antar Organisasi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan misi yang diembannya maka tujuan yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui penyusunan Renstra ini adalah:

- 1) Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Kerja untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah.
- 2) Terwujudnya peningkatan daya guna hasil-hasil kinerja sebagai basis dalam membangun daya saing dan kemandirian daerah.

- 3) Terwujudnya peningkatan aktivitas diseminasi penerapan teknologi di daerah guna meningkatkan nilai tambah usaha masyarakat.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan di atas maka diperlukan suatu strategi agar tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien sesuai dengan sumberdaya internal dan dukungan eksternal yang tersedia. Strategi tersebut meliputi :

- 1) Menata sistem penentuan arah kebijakan dan rencana aksi Sekretariat Daerah yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan Sekretariat Daerah prioritas secara lebih selektif.
- 2) Mendorong kerjasama dengan instansi terkait terutama dalam usaha pemecahan permasalahan (*problem solving*) melalui pemanfaatan hasil-hasil Kinerja.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, SDG's dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan 2016-2036 memuat peruntukan ruang di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lingkungan hidup merupakan isu yang mengemukakan pada saat ini, terjadinya kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia.

3.4.2 Telaah SDGs

Analisa permasalahan dan Isu Strategis capaian SDGs Sumatera Selatan dilakukan dengan melihat gambaran pencapaian Sumatera Selatan (pada Bab II) yang telah *ditagging* dengan beberapa indikator utama yang belum tercapai dan melakukan analisa permasalahan dengan melakukan *cascading* per pilar untuk mengetahui akar permasalahan dan mendapatkan isu strategis tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan yang akan menjadi acuan pada RPJMD Sumatera Selatan Periode 2019-2023. Tatakelola Pemerintahan yang baik Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah indikator utama tujuan dalam pembuat kebijakan.

Berdasarkan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sumatera Selatan Tahun 2016-2018, dimana telah dilakukan telaah terhadap kebijakan- kebijakan dalam Reformasi

Birokrasi dan Peraturan Perundang-undangan, maka isu strategis adalah 8 area perubahan terkait dengan akar masalah Reformasi Birokrasi di Sumatera Selatan. Akar masalah ini yang menjadi isu strategis yang memerlukan upaya yang serius dalam penanganannya, yaitu:

1. Manajemen Perubahan;
2. Penataan dan penguatan Organisasi;
3. Penataan Peraturan Perundang-undangan;
4. Penataan Sumber Daya Manusia;
5. Penataan Tatalaksana;
6. Penguatan Pengawasan;
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

3.4.3 Analisis terhadap KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau yang lebih dikenal dengan KLHS adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. KLHS sendiri memuat kajian tentang :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Ruang Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan sudah mengacu pada KLHS. Memperhatikan kelestarian Lingkungan Hidup karena lingkungan hidup merupakan bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah. Lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019 – 2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan perangkat daerah
6. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif, Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.

3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tatalaksana, aparatur dan pelayanan administratif kepada perangkat daerah serta pelayanan pengadaan barang/ jasa Pemerintah Provinsi.

Sekretaris Daerah juga mempunyai mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana;
- f. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Provinsi.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan di dalam menyusun Renstra Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme tugas dan fungsi pada bagian masing-masing biro masih terkadang rancu dan belum berjalan lancar;
2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah sehingga terkadang tidak sinkron dengan peraturan daerah;

3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal.

Berbagai isu strategis tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan dalam mewujudkan Pemerintahan, terutama didalam merumuskan Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Sekretariat Daerah diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan harapan diatas beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya sikap yang arif dan cerdas agar pelaksanaan Kepemerintahan sesuai dengan dinamika peraturan perundangan yang berlaku.
2. Proses dan mekanisme dalam menentukan arah kebijakan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Perlu adanya panduan terhadap sistem dan mekanisme dalam berkerja.
4. Meningkatnya kapasitas kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses dalam berkerja.
5. Meningkatnya kualitas SDM terhadap penguasaan keahlian (*skill*) yang sesuai tugas pokok dan fungsi pada pemangku jabatan.

3.5.1. Analisis Lingkungan Strategis

Untuk dapat mewujudkan target tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dilakukan analisis berbagai faktor yang mendorong maupun yang menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah. Hasil analisis lingkungan strategis yang berdasarkan dari hasil perumusan dan pembahasan, maka dapat disampaikan gambaran analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang selanjutnya dilakukan penilaian serta penentuan prioritas. Dari hasilprioritas tersebut kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai berikut :

3.5.1.1. Analisis Lingkungan Internal

Analisis Lingkungan Internal (ALI) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Dari hasil analisa lingkungan internal di dapat Kekuatan yang dimiliki Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu antara lain :

1. Memiliki SDM Struktural.

2. Memiliki sarana prasarana yang mendukung dalam melakukan pekerjaan.
3. Telah ada kerjasama atau kemitraan (K/L, BUMD dll).
4. Tersedia media publikasi (Web, Facebook).
5. Adanya Dukungan Pemerintah Daerah dan Pusat.
6. Memiliki SOP.

Dari hasil analisa lingkungan internal di dapat Kelemahan yang miliki Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu antara lain :

1. Kualitas dan Kuantitas SDM.
2. Belum ada tim internal pengendali mutu kinerja.
3. Koordinasi program/kegiatan lintas PD maupun internal belum optimal dikarenakan masih kurang pemahaman SDM dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
4. Manajemen database Kepegawaian belum optimal dikarenakan Sekretariat Daerah masih melakukan database Kepegawaian masih secara manual.

3.5.1.2 Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil analisa lingkungan eksternal di dapat Peluang yang dihadapi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu antara lain :

Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung dalam menentukan kebijakan.

Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dari hasil analisa lingkungan eksternal di dapat Tantangan yang dihadapi, yaitu antara lain :

1. Budaya ego sektoral relatif masih tinggi.
2. Mindset Inovatif belum merata.
3. Pelayanan publik harus cepat dan memuaskan.
4. Dinamika kemajuan Teknologi yang semakin cepat serta perubahan iklim Global yang ekstrim.

3.5.1.3 Analisis Strategi dan Pilihan

Strategi adalah kegiatan untuk mengantisipasi secara menyeluruh, meramalkan pencapaian tujuan kedepan melalui pendekatan rasional. Strategi ini disusun dengan memadukan antara Kekuatan dengan Peluang, Kekuatan dengan Ancaman, Kelemahan dengan Peluang, serta Kelemahan

dengan Ancaman melalui metode analisa SWOT. Dengan demikian akan diperoleh berbagai pilihan strategi yang perlu diuji kembali dengan visi, misi dan nilai-nilai Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

a. Kekuatan-Peluang (S-O)

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas Kinerja.
2. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Sekretariat Daerah cukup strategis.

b. Kekuatan-Ancaman (S-T)

1. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi Masyarakat.
2. Mengoptimalkan suasana kerja demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.
3. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.

c. Kelemahan-Peluang (W-O)

1. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
2. Meningkatkan kualitas laporan Kinerja melalui pemanfaatan teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi.
3. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi.
4. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Kelemahan-Ancaman (W-T)

1. Menyediakan tatalaksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dana aspirasi masyarakat.
2. Mendayagunakan kemampuan pegawai untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
3. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk-produk hukum dan kebijakan-kebijakan daerah.
4. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai.

3.5.1.4 Analisis Faktor Penentu Keberhasilan

Faktor penentu keberhasilan merupakan hasil kajian dari pilihan-pilihan strategi yang telah diuji dengan visi, misi dan nilai-nilai. Hasil kajian yang cermat dan teliti dari beberapa pilihan strategi menghasilkan faktor

penentu keberhasilan yang terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana kedua unsur tersebut saling mendukung dan tidak dapat berdiri sendiri.

Adanya faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diartikan sebagai faktor yang mempunyai daya dorong yang besar untuk mewujudkan visi, dan misi Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan analisis dari hasil pembobotan berdasarkan metode *profesional judgement* maka terdapat 15 strategi pilihan atau Analisis Strategis Pilihan (ASP) sebagai berikut :

1. Meningkatkan partisipasi perangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah
2. Meningkatkan koordinasi antar instansi untuk meningkatkan kualitas kinerja
3. Meningkatkan kualitas perumusan kebijakan daerah dengan peran Sekretariat yang cukup strategis.
4. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi hasil kinerja yang optimal
5. Mengoptimalkan peran Sekretariat Daerah sebagai pembuat kebijakan sebagai pedoman dalam penentu keputusan.
6. Mengoptimalkan suasana kerja yang demokratis dan dinamis untuk mengatasi kebijakan penataan pegawai yang belum optimal.
7. Mengoptimalkan akses informasi pembangunan dalam menyikapi peraturan perundangan yang tidak selaras.
8. Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kompetensi pegawai.
9. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi melalui koordinasi antar instansi.
10. Meningkatkan kelengkapan tata laksana organisasi dengan kerjasama dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
12. Mengoptimalkan kualitas data dan informasi untuk pemanfaatan produk- produk hukum.
13. Mengoptimalkan disiplin kerja aparat untuk mengurangi dampak kebijakan penataan pegawai.
14. Mengoptimalkan Penataan Ketatalaksanaan.
15. Meningkatkan Penguatan Akuntabilitas.

3.5.2.1 Faktor-faktor Penentu Keberhasilan

Dari hasil perumusan dan pembahasan pada analisis lingkungan internal maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat disampaikan beberapa Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) sebagai berikut :

- FPK I Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat.
- FPK II Meningkatkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan kerjasama antar Perangkat Daerah.
- FPK III Meningkatkan kualitas Kinerja dalam menentukan hasil kedepan (*Outcome*).
- FPKIV Menyediakan tata laksana organisasi untuk mengantisipasi tuntutan dan aspirasi masyarakat.

3.5.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dalam menentukan isu isu strategis, ada beberapa faktor yang ditinjau, yaitu apakah isu tersebut mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, apakah merupakan tanggung jawab Perangkat Daerah, memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, kemungkinan mudah untuk ditangani, dan merupakan prioritas janji politik yang perlu diwujudkan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.1 Penentuan Kriteria Berdasarkan Bobot Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap Pencapaian sasaran Renstra Lembaga	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab PD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
T o t a l		100

Berdasarkan Tabel pembobotan diatas dihubungkan dengan Isu strategis OPD, maka didapatkan hasil perhitungan seperti dibawah ini :

Tabel 3.2 Penentuan Issue Strategis dan Penentuan Skor Nilai Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tupoksi Sekretaris Daerah membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tatalaksana, aparatur dan pelayanan administratif kepada perangkat daerah serta pelayanan pengadaan barang/ jasa Pemerintah Provinsi.				4			80
2	Motivasi Pegawai untuk meningkatkan Kinerja				4			80
3	Jumlah dan Kompetensi SDM Sekretariat Daerah							
4	Motivasi dan Minat Skill (SDM)					5		100
5	SOP Penunjang untuk melaksanakan kegiatan					5		100
6	Kepatuhan Pelaksanaan SOP yang ada				4			80
7	Kepatuhan dalam Pelaksanaan Roadmap				4			80
8	Sumber Daya Alam yang mendukung					5		100
9	Kebijakan Berbasis Hasil Kinerja (Belum Semua)			3				60

Keterangan : Total skor = Nilai Skala (1-5) dikalikan bobot

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Visi

Dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai pada periode 2013-2018; memperhatikan hasil analisis isu strategis; mengacu visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih untuk masa bakti 2018-2023; mengikuti prioritas pembangunan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025; memperhatikan prioritas pembangunan nasional; merujuk pada tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945; serta memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan, maka visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 adalah:

SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Sumsel maju untuk Semua adalah keadaan dimana terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan atau pembangunan berkelanjutan dan pembangunan maritim yang merata dan berkeadilan, dimana hasil-hasil pembangunannya dinikmati seluruh anggota masyarakat.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi dimana meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, integritas, dan kearifan lokal, di samping terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat dengan dukungan anggaran pro-rakyat, pro-lingkungan, dan pro-gender yang transparan dan akuntabel.

Sumsel Maju untuk Semua adalah kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sumsel Maju untuk Semua adalah terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi kehidupan masyarakat sehingga anggota masyarakat dapat menjalankan aktivitas keagamaan, terciptanya kehidupan masyarakat yang menghargai perbedaan, dan masyarakat dapat menikmati kesenian yang bermutu di pusat- pusat kebudayaan.

Misi

Berdasarkan visi pembangunan yang telah ditetapkan, misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, yaitu :

Misi 1 : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas.

Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi 4 : Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.

Misi 5 : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah masuk ke Misi Ketiga dan Ke Lima

Dalam Upaya mewujudkan **Pada Misi Ketiga** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.

Misi 5: Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, dan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mendukung Prioritas Pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019, maka tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Misi 2: “Meningkatkan kualitas SDM, baik laki-laki maupun perempuan, yang sehat, berpendidikan, profesional, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, ketaqwaan, kejujuran, dan integritas”.

Tujuan 2 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran :

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (Maju Kesehatan Masyarakat).
2. Meningkatnya Akses Pendidikan Berkualitas (Maju Akses Pendidikan Berkualitas).

Misi 3: “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif”.

Tujuan 4 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas).
2. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel).
3. Meningkatnya Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pemerintah Daerah (Maju Aparatur Profesional dan Berintegritas).

Misi 5: “Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius”.

Tujuan 6 : Terwujudnya Masyarakat Madani Sasaran :

Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)

Tujuan 7 : Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah melalui Seni, Budaya, dan Religi

Sasaran :

Meningkatnya Seni, Budaya, dan Pariwisata (Maju Seni, Budaya, dan Pariwisata)

Tujuan 8 : Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Olahraga

Sasaran :

Meningkatnya Pembangunan Pemuda dan Olahraga (Maju Pemuda dan Olahraga)

Adapun indikator dari tujuan dan sasaran di atas beserta target yang hendak dicapai selama tahun 2019-2023 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4.1

TABEL 4.1. TUJUAN DAN SASARAN MISI KESATU DAN KELIMA

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR		TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	1.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	1.1.1	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	ST (SANGAT TINGGI)	ST (SANGAT TINGGI)	ST (SANGAT TINGGI)	ST (SANGAT TINGGI)	ST (SANGAT TINGGI)
		2.1	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	2.1.1	Persentase Produk Hukum Daerah, Penanganan Perkara dan HAM	100%	100%	100%	100%	100%
		3.1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas (Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel)	3.1.1	Nilai SAKIP (Skor)	A (81-82)	A (82-83)	A (83-85)	A (84-85)	A (85-86)
				3.1.2	Persentase Kualitas Komunikasi dan Informasi	100%	100%	100%	100%	100%
				3.1.3	Indeks Reformasi Birokrasi	BB (74)	BB (74)	BB (74)	A (84)	A (84)
		4.1	Meningkatnya Pelayanan Publik Berkualitas (Maju Pelayanan Publik Berkualitas)	4.1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	B (62,51)	B (62,51)	B (62,51)	A (81,26)	A (81,26)
		5.1	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah	5.1.1	Persentase Penyerapan Fisik Keuangan dan Fisik Program/Kegiatan OPD Provinsi Sumatera Selatan Sesuai Rencana dan Target	100%	100%	100%	100%	100%
		6.1	Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	6.1.1	Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan (ULP)	100%	100%	100%	100%	100%
				6.1.2	Persentase Pelelangan yang Menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	100%	100%	100%	100%	100%
		7.1	Meningkatnya Koordinasi Perumusan Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	7.1.1	Jumlah Pemekaran Kabupaten dan Kecamatan yang Difasilitasi	3 Kabupaten 2 Kecamatan	3 Kabupaten 2 Kecamatan	3 Kabupaten 2 Kecamatan	3 Kabupaten 2 Kecamatan	3 Kabupaten 2 Kecamatan
				7.1.2	Jumlah Pilar Batas Daerah yang Terpasang	60 Pilar	60 Pilar	60 Pilar	60 Pilar	60 Pilar
				7.1.3	Jumlah Kabupaten Pemekaran yang telah Memiliki Infrastruktur Sesuai Standar	3 Kabupaten	3 Kabupaten	3 Kabupaten	3 Kabupaten	3 Kabupaten

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -						
				5	6	7	8	9		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
			7.1.4	Jumlah Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota/Swasta/BUMN/BUMND dan Lembaga Non Pemerintah	20 Dokumen MoU	30 Dokumen MoU	35 Dokumen MoU	40 Dokumen MoU	45 Dokumen MoU	
		8.1	Meningkatnya Koordinasi Bidang-Bidang Perekonomian	8.1.1	Persentase Data Informasi Pembangunan Bidang Ekonomi yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%
				8.1.2	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi kepada PAD	100%	100%	100%	100%	100%
		9.1	Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	9.1.1	Persentase Kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat yang efektif	100%	100%	100%	100%	100%
		9.2	Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	9.2.1	Meningkatnya Peringkat MTQ	-	20 Besar	-	15 Besar	-
				9.2.2	Meningkatnya Peringkat STQ	20 Besar	-	15 Besar	-	15 Besar
		10.1	Berkembangnya Tata Kepemerintahan yang baik	10.1.1	Persentase PD yang telah memiliki struktur organisasi yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%
				10.1.2	Persentase PD yang telah menerapkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.	50%	60%	70%	80%	90%
				10.1.3	Persentase Pelaksanaan SPM Provinsi.	100%	100%	100%	100%	100%
				10.1.4	Persentase kehadiran aparatur di Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel	97%	97%	97%	97%	97%
				10.1.5	Persentase Fasilitasi Sarana dan Prasarana yang Optimal	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat daerah adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Sekretariat Daerah menunjukkan bagaimana cara Sekretariat Daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat Daerah selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Sekretariat Daerah bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat Daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Sekretariat Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Sekretariat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Provinsi Sumantera Selatan. Sementara itu kebijakan dan strategi Sekretariat Daerah, meliputi:
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA			
MISI I : Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan, didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik di perkotaan maupun di perdesaan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Perekonomian yang Inklusif berbasis Inovasi Daerah	1. Maju Ekonomi Kerakyatan 2. Maju Investasi, Industri dan Perdagangan 3. Maju Pertanian Rakyat dan Kedaulatan Pangan	1. Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan 2. Peningkatan Investasi, Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan melalui Peningkatan (Biro Ekonomi)
MISI III : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas KKN dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Terfasilitasinya kunjungan kerja lembaga legislatif ke Provinsi Sumatera Selatan	Kunjungan Kerja lembaga legislative ke Provinsi Sumatera Selatan.	Mengadakan rapat persiapan dengan Biro Umum & Perlengkapan, Biro Humas dan Protokol atas kunker lembaga legislatif sertan perangkat daerah yang menjadi locus kunjungan.
	Terlaksana Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan pemekaran kecamatan	Pembinaan Daerah Otonomi Baru (DOB)	Melakukan Pembinaan Daerah Otonomi Baru (DOB) bersama kemendagri RI dan memfasilitasi pemekaran kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang bebas KKN, Transparan dan Akuntabel	1. Sasaran 1.1 Terfasilitasi penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan hukum Pemprov.	1. Strategi 1.1 Ditetapkannya Keputusan KDH sesuai usulan	1. Arahan Kebijakan 1.1 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Prima, Bersih, Bebas KKN
	2. Sasaran 1.2 Terlaksananya Evaluasi/ Fasilitasi/ Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota	2. Strategi 1.2 Terselesainya Perkara yang menyangkut kepentingan hukum	2. Arah Kebijakan 2. 1 terlaksananya penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan pemprov. Sumsel
	3. Sasaran 1.3 Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma	3. Strategi 1.3 Terlaksananya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang di evaluasi /fasilitasi/klarifikasi	Terciptanya produk hokum yang berkualitas
	Maju Pelayanan Publik (Meningkatnya pelayanan publik berkualitas)	Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat	- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik yang Prima, Bersih, Bebas KKN - Meningkatkan Efektifitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat - Meningkatkan Bahan Kebijakan Pembinaan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan - Meningkatkan Bahan Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga - Meningkatkan Bahan Kebijakan Kesejahteraan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan
Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana yang profesional	Meningkatnya kinerja manajemen pemerintahan yang akuntabel, transparan dan dapat di akses oleh publik	Percepatan Pembinaan dalam penyusunan laporan kinerja(SAKIP)	- Meningkatkan Pembinaan Penyusunan SAKIP Prov, Kab/ Ko se Sumatera Selatan - Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Prov. Sumsel)
MISI IV : Membangun dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Mewujudkan pemerataan pembangunan berkelanjutan	Tersedianya data base kebutuhan inovasi dan teknologi	1.Peningkatan Jumlah media yang digunakan 2.Peningkatan Jumlah jenis data dan informasi yang tersedia	1. Meningkatkan jumlah media yang digunakan 2. Meningkatkan Jumlah jenis data dan informasi yang tersedia
	Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana	1.Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia 2.Peningkatan peralatan pendukung KDH/WKDH	1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia 2. Meningkatkan peralatan pendukung kerja kantor
MISI V : Meningkatkan kehidupan beragama, seni, dan budaya untuk membangun karakter kehidupan sosial yang agamis dan berbudaya, ditopang fisik yang sehat melalui kegiatan olahraga, dan pengembangan pariwisata berorientasi pariwisata religius.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Sasaran 10 Maju Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel	-Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Madani dan Berprestasi -Optimalisasi reformasi birokrasi dan stabilitas keamanan	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pengurangan Kemiskinan melalui Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, Kualitas Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia
Terwujudnya masyarakat madani	Mewujudkan Kestabilan Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama yang Berkualitas (Maju Stabilitas Keamanan, Ketertiban dan Kehidupan Beragama)	-Mendorong Penguatan pengetahuan, sikap dan Praktek Keagamaan masyarakat agar terbentuk masyarakat madani dan religius	- Meningkatkan Kualitas Kerukunan Beragama - Memfasilitasi Tokoh Agama dalam Meningkatkan Pengetahuan Keagamaan - Mewujudkan Satu Desa Satu Rumah Tahfidz - Mendorong Penguatan pengetahuan, sikap dan Praktek Keagamaan masyarakat agar terbentuk masyarakat madani dan religius

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung	Lokasi
							Tahun-1 (2019)		Tahun-2 (2020)		Tahun-3 (2021)		Tahun-4 (2022)		Tahun-5 (2023)		Target	Rp		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
	Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	4.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Outcome: Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	33.062.621.000	100%	44.453.692.400	100%	47.336.373.385	100%	52.113.861.156	100%	60.161.713.093	100%	237.032.511.034		
			4.01.03.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Output : Jumlah Tenaga Outsourcing yang dibayar	20 Orang	20 Org	620.880.000	20 Orang	650.000.000	20 Orang	650.000.000	20 Orang	650.000.000	20 Orang	650.000.000	20 Orang	3.220.880.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Prov. Sumsel
			4.01.03.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Output : Jumlah tenaga honor yang mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran	4 org	4 org	124.176.000	8 org	260.000.000	24 org	260.000.000	24 org	260.000.000	24 org	260.000.000	84 org	1.164.176.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang
			4.01.03.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Output :Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	15 Orang	18 Org	-	18 Org	608.760.000	18 Org	645.285.000	18 Org	684.000.000	18 Org	725.420.000	87 Org	2.663.465.000	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Palembang
				Kegiatan Senam Kesegaran Jasmani di Lingkungan Setda Provinsi Sumsel	Output : Jumlah Tutor dan Peserta yang Mengikuti SKJ	5 Tutor dan 400 Orang Peserta SKJ	5 Tutor dan 400 Orang Peserta SKJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 Tutor dan 400 Orang Peserta SKJ	-	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Palembang
			4.01.03.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/	Output : jumlah tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran	3 orang	3 orang	93.132.000	3 orang	101.790.000	3 orang	101.790.000	3 orang	101.790.000	3 orang	101.790.000	15 orang	500.292.000	Biro Perekonomian	Palembang

			4.01.03.01.19	Perkantoran	Output : Jumlah Jasa Pendukung Administrasi Teknis / perkantoran yang Tersedia	6 Orang	6 Org	186.000.000	6 Org	195.000.000	6 Org	195.000.000	6 Org	195.000.000	6 Org	195.000.000	6 Org	966.000.000	Biro administrasi pembangun an	Palembang
			4.01.03.01.07	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Output : Jumlah honorarium yang dibayarkan kepada pengelola adm Keuangan	-	3 Bulan	750.000	1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	12.750.000	Biro Pengadaan Barang / Jasa	Palembang
			4.01.03.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Outcoput : Jumlah ATK Di Biro Pengadaan Barang/Jasa	-	3 Bulan	75.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	400.000.000	1 Tahun	1.300.000.000	Biro Pengadaan Barang / Jasa	Palembang
			4.01.03.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Output : Jumlah Tenaga kerja lainnya	-	3 Bulan	234.900.000	15 Org	508.950.000	15 Org	508.950.000	15 Org	508.950.000	15 Org	508.950.000	15 Org	2.270.700.000	Biro Pengadaan Barang / Jasa	Palembang
			4.01.03.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Output : Jumlah Tenaga Outsourcing yang dibayar	12 Orang	12 Orang	405.840.000	12 Orang	450.450.000	12 Orang	390.000.000	12 Orang	390.000.000	12 Orang	390.000.000	12 Orang	2.008.818.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Output : Jumlah Orang Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	289 Orang	289 Orang	11.112.816.000	295 Orang	12.224.097.600	295 Orang	13.446.507.350	295 Orang	14.791.158.096	300 Orang	16.270.273.905	1.474 Orang	67.844.852.951	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Output : Jumlah honorarium yang dibayarkan kepada pengelola adm Keuangan	12 orang	12 Orang	50.000.000	12 Orang	53.000.000	12 Orang	50.000.000	12 Orang	50.000.000	12 Orang	50.000.000	60 Orang	253.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Output : Jumlah Honorarium	18 Orang	25 Orang	776.100.000	25 Orang	812.500.000	25 Orang	861.250.000	25 Orang	931.450.000	25 Orang	942.500.000	25 Orang	4.323.800.000	Biro Humas dan protokol	Palembang
			4.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Jumlah Jenis Alat Kantor yang tersedia	25 jenis ATK untuk 1 Tahun	25 jenis ATK untuk 1 Tahun	15.000.000	27 jenis ATK untuk 1 tahun	18.000.000	30 jenis ATK untuk 1 tahun	20.000.000	32 jenis ATK untuk 1 tahun	22.000.000	34 jenis ATK untuk 1 tahun	25.000.000	149 ATK untuk 1 tahun	100.000.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang
			4.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Jumlah ATK untuk Kelancaran Kegiatan Administrasi Perkantoran	12 jenis	11 Jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 Jenis	-	Biro Kesra Prov. Sumsel	Palembang

			4.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Alat Tulis Kantor (ATK) yang tersedia	-	-	-	19 Jenis	30.396.300	19 Jenis	9.103.900	19 Jenis	9.103.900	19 Jenis	9.103.900	76 jenis	57.708.000	Biro Perekonomian	Palembang
			4.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	0	0	0	20 Jenis	100.000.000	20 Jenis	150.000.000	25 Jenis	200.000.000	25 Jenis	200.000.000	90 Jenis	650.000.000	Biro administrasi pembangunan	Palembang
			4.01.03.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan Cetak Kantor	Output : Menyediakan ATK dan Cetak Kantor yang dibutuhkan	32 Item	NA	NA	32 Item	58.213.000	32 Item	70.000.000	32 Item	80.000.000	32 Item	100.000.000	32 Item	308.213.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Jumlah alat tulis kantor yang dibeli guna kelancaran kegiatan administrasi perkantoran	114 item	114 item	200.000.000	114 item	1.000.000.000	114 item	1.000.000.000	114 item	1.000.000.000	114 item	1.500.000.000	114 item	4.700.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.01.33	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah dan ke Luar Negeri	Output : Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan	20 Kali	70 Kali	307.000.000	75 Kali	400.000.000	80 Kali	400.000.000	85 Kali	400.000.000	90 Kali	400.000.000	400 Kali	1.907.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang
			4.01.03.01.33	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah dan ke Luar Negeri	Output : Frekuensi koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah	20 kali	25 kali	283.380.000	40 kali	497.000.000	45 kali	515.000.000	48 kali	526.000.000	50 kali	543.000.000	208 kali	2.364.380.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang
			4.01.03.01.33	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah dan ke Luar Negeri	Output : Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan ke luar daerah	60 Kali	60 Kali	-	60 Kali	661.240.000	60 Kali	701.715.000	60 Kali	743.000.000	60 Kali	787.580.000	60 Kali	2.893.535.000	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Palembang
			4.01.03.01.33	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam	Output : jumlah koordinasi dan konsultasi kedalam daerah, keluar daerah dan luar negeri	48 Kali	48 Kali	200.000.000	49 Kali	289.000.000	49 Kali	65.000.000	49 Kali	65.000.000	49 Kali	65.000.000	49 Kali	684.000.000	Biro Perekonomian	Palembang

				Daeran, ke Luar Daerah dan ke Luar Negeri																
			4.01.03.01.33	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	Output : Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilakukan	20 Kali	20 Kali	250.000.000	20 Kali	400.000.000	20 Kali	450.000.000	25 Kali	490.000.000	30 Kali	500.000.000	105 Kali	2.090.000.000	Biro administrasi pembangunan	Palembang
			4.01.03.01.33	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daeran, ke Luar Daerah dan ke Luar Negeri	Output : Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilakukan	-	3 Bulan	300.000.000	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	1.735.200.000	1 Tahun	1.735.200.000	1 Tahun	1.735.200.000	1 Tahun	5.805.600.000	Biro Barang dan Jasa	Palembang
			4.01.03.01.33	Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	Output : Jumlah Perjalanan Dinas yang Dilaksanakan	45 kali	45 kali	477.472.000	45 kali	400.000.000	45 kali	400.000.000	45 kali	500.000.000	45 kali	600.000.000	45 kali	2.377.472.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.01.33	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daeran, ke Luar Daerah dan ke Luar Negeri	Output : Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	2000 kali (dalam, luar daerah dan luar negeri)	2000 kali (dalam, luar daerah dan luar negeri)	4.000.000.000	2200 kali (dalam, luar daerah dan luar negeri)	8.000.000.000	2500 kali (dalam, luar daerah dan luar negeri)	7.500.000.000	2500 kali (dalam, luar daerah dan luar negeri)	2700 kali (dalam, luar daerah dan luar negeri)	10.000.000.000	11.900 kali (dalam, luar daerah dan luar negeri)	37.000.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang	
			4.01.03.01.33	Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daeran, ke Luar Daerah dan ke Luar Negeri	Output : Frekuensi Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah, Ke Luar Daerah dan Ke Luar Negeri	50 kali	25 kali	300.000.000	25 kali	300.000.000	30 kali	450.000.000	35 kali	500.000.000	40 kali	550.000.000	45 kali	2.100.000.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang
			4.01.03.01.11	Penyediaan Barang	Output : Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan di Lingkungan Setda	-	3 bulan	100.000.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	131.497.885	1 Tahun	131.497.885	1 Tahun	131.497.885	1 Tahun	519.493.655	Biro Barang dan Jasa	Palembang

				Cetakan dan pengandaan																
			4.01.03.01.11		Output : Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan di Lingkungan Setda	37 jenis cetakan	37 jenis cetakan	200.000.000	37 jenis cetakan	500.000.000	40 jenis cetakan	500.000.000	40 jenis cetakan	500.000.000	45 jenis cetakan	1.100.000.000	199 item	2.800.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.01.08	Penyediaan Alat	Output :Jumlah Aset dan Bangunan Kantor yang Bersih	-	3 bulan	50.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	240.000.000	1 Tahun	240.000.000	1 Tahun	240.000.000	1 Tahun	870.000.000	Biro Barang dan Jasa	Palembang
			4.01.03.01.08	Kebersihan Kantor (AKK)	Output : Menyediakan Alat Kebersihan Kantor yang Dibutuhkan	25 Item	NA	NA	25 Item	15.000.000	25 Item	20.000.000	25 Item	40.000.000	25 Item	50.000.000	25 Item	125.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.01.08		Output : Jumlah terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran melalui aset/bangunan/gedung yang bersih, nyaman, tertata, rapi dan indah	7 aset bangunan dan gedung kantor	7 aset bangunan dan gedung kantor	1.000.000.000	7 aset bangunan dan gedung kantor	1.500.000.000	7 aset bangunan dan gedung kantor	1.500.000.000	7 aset bangunan dan gedung kantor	1.700.000.000	7 aset bangunan dan gedung kantor	1.700.000.000	35 aset bangunan dan gedung kantor	7.400.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.01.01.08		Output : Jumlah Peralatan dan Bahan Pembersih	20 Jenis	20 Jenis	30.000.000	20 Jenis	35.000.000	20 Jenis	37.500.000	20 Jenis	40.000.000	20 Jenis	42.500.000	20 Jenis	185.000.000	Biro Humas dan protokol	Palembang
			4.01.03.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Jumlah Adminitrasi Surat Masuk dan Keluar	2.000 Surat	2.000 Surat	25.000.000	3.000 Surat	27.500.000	3.500 Surat	30.250.000	4.000 Surat	33.275.000	4.000 Surat	36.602.500	16.500 Surat	152.627.500	Biro Umum dan perlengkapan	Palembang
			4.01.03.01.01		Output : Jumlah Materai	5.000 Materai	5.000 Materai	30.000.000	8.000 Materai	48.000.000	7.000 Materai	42.000.000	7.000 Materai	42.000.000	7.000 Materai	42.500.000	5.430 Materai	204.500.000	Biro Humas dan Protokol	Palembang
			4.01.03.01.01		Output : Jumlah Surat Kabar dan majalah	20 Jenis	20 Jenis	23.000.000	20 Jenis	24.150.000	20 Jenis	24.250.000	20 Jenis	24.350.000	20 Jenis	24.500.000	20 Jenis	24.500.000	Biro Humas dan Protokol	Palembang
			4.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Jumlah tagihan telepon, air dan listrik yang dikelola BUP	26 aset bangunan dan gedung kantor	26 aset bangunan dan gedung kantor	6.700.000.000	26 aset bangunan dan gedung kantor	7.955.000.000	26 aset bangunan dan gedung kantor	7.955.000.000	26 aset bangunan dan gedung kantor	8.917.700.000	26 aset bangunan dan gedung kantor	10.809.470.000	130 aset bangunan dan gedung kantor	42.337.170.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.01.02		Output : Jumlah tagihan telepon, air dan listrik yang dikelola BUP	1 Biro	3 Bulan	75.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	200.000.000	5 Tahun	925.000.000	Biro Barang dan Jasa	1 Biro
			4.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan	Output : Sarana dan Prasarana yang difasilitasi	-	1 Paket	1.650.000.000	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	950.000.000	1 Tahun	550.000.000	1 Tahun	550.000.000	1 Tahun	4.000.000.000	Biro Barang dan Jasa	Palembang

				dan Perlengkap n Kantor																
			4.01.03.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap n Kantor	Output : Jumlah pelaksanaan acara yang terfasilitasi oleh Pemprov.	15 acara	15 acara	1.000.000.000	15 acara	2.500.000.000	20 cara	2.000.000.000	20 acara	4.000.000.000	25 acara	4.600.000.000	95 acara	14.100.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Output : Jumlah acara makanan dan minuman untuk rapat/kegiatan/tamu	1044 kali acara	3 Bulan	25.750.000	1 Tahun	25.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun	500.750.000	Biro Barang dan Jasa	Palembang
			4.01.03.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Output : Jumlah rekapitulasi aset gedung yang difasilitasi asuransi	R4=85 unit Gedung = 21 unit	R4=85 unit Gedung = 21 unit	791.425.000	R4=85 unit Gedung = 21 unit	870.567.500	R4=85 unit Gedung = 21 unit	957.624.250	R4=85 unit Gedung = 21 unit	1.053.386.275	R4=85 unit Gedung = 21 unit	1.158.724.903	R4=425 unit Gedung = 105 unit	4.831.727.928	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan/dinas	Output : Jumlah pelaksanaan pelunasan pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional	200 unit	200 unit	300.000.000	200 unit	350.000.000	215 unit	350.000.000	215 unit	350.000.000	215 unit	350.000.000	1045 unit	1.700.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan/gedung/kantor untuk 1 Biro		1 Biro	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	Biro Barang dan Jasa	Palembang
			4.01.03.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Jumlah komponen instalasi listrik /penerangan bangunan/gedung/kantor untuk 26 aset	26 jenis, 2 perbaikan instalasi	26 jenis, 2 perbaikan instalasi	200.000.000	26 jenis, 2 perbaikan instalasi	220.000.000	26 jenis, 2 perbaikan instalasi	242.000.000	26 jenis, 3 perbaikan instalasi	266.200.000	26 jenis, 3 perbaikan instalasi	292.820.000	130 jenis, 12 perbaikan instalasi	1.221.020.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.01.29	Penyediaan jasa sewa sarana mobilitas	Output : Jumlah unit kendaraan sewa mobilitas darat	400 unit	400 unit	800.000.000	400 unit	1.380.000.000	400 unit	968.000.000	400 unit	1.064.800.000	400 unit	1.171.280.000	2.000 unit	5.384.080.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.00.02.05	Pengadaan kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Output : Jumlah kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang tersedia	3	3	-	3	60.000.000	0	-	3	75.000.000	0	-	9	135.000.000	Biro Administrasi Pembangun	Palembang

																		an		
			4.01.03.00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Outcome : Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	53.941.231.980	100%	66.500.401.185	100%	39.410.778.230	100%	30.633.762.042	100%	50.372.674.183	100%	240.858.847.640		
			4.01.03.02.12	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Output : Jumlah Pengadaandan perlengkapan kantor yang Tersedia	0	0	0	3 Komp, 3 Printer, 3 Laptop dan 3 AC	150.000.000	0	0	0	0	0	0	3 Komp, 3 Printer, 3 Laptop dan 3 AC	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang	
			4.01.03.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis	10 jenis	280.000.000	8 jenis	293.400.000	10 jenis	310.000.000	10 jenis	310.000.000	10 jenis	340.000.000	48 jenis	1.533.400.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang
			4.01.03.00.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	3 jenis	8 Jenis	-	22 Jenis	106.000.000	22 Jenis	112.360.000	22 Jenis	119.101.600	22 jenis	126.247.696	88 Jenis	463.709.296	Biro Kesra	Palembang
			4.01.03.00.02.08	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Output : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Kesra	Palembang
			4.01.03.00.05.18	Kontribusi Pelatihan, Seminar dan Simposium dll	Output :Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang Berfungsi Baik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Kesra	Palembang
			4.01.03.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 jenis	2 jenis	15.000.000	5 jenis	35.000.000	-	-	-	-	-	-	7 jenis	50.000.000	Biro Perkeonomian	Palembang
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Laptop tersedia	1 unit	1 unit	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 unit	20.000.000	Biro Perekonomian	Sumsel
			4.01.03.02.12	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor tersedia	100%	12 unit	10.100.000	12 unit	14.000.000	15 unit	20.000.000	14 unit	12.500.000	15 unit	20.000.000	68unit	76.600.000	Biro administrasi pembangunan	Palembang
			4.01.03.02.12	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah Perlengkapan Kantor yang Tersedia	12 item	12 item	180.000.000	12 item	100.000.000	12 item	100.000.000	12 item	100.000.000	12 item	100.000.000	12 item	580.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.02.12	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Output : Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dianggarkan	250 jenis	250 jenis	3.230.500.000	250 jenis	6.000.000.000	300 jenis	5.000.000.000	350 jenis	3.500.000.000	400 jenis	3.500.000.000	1.550 jenis	21.230.500.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.02.05	Pengadaan kendaraan bermotor	Output : Jumlah kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang tersedia	100%	0	0	3 Unit	60.000.000	0	0	3 Unit	75.000.000	0	0	6 unit	135.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang

			4.01.03.02.05	roda 2 (dua) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dianggarkan	5 unit	R4 = 5 unit, R2 = 3 unit	5.373.000.000	R4 = 5 unit, R2 = 5 unit	10.075.973.700	R4 = 6 unit, R2 = 3 unit	6.350.000.000	R4 = 6 unit, R2 = 4 unit	4.200.000.000	R4 = 6 unit, R2 = 5 unit	8.400.000.000	R4 = 28 unit, R2 = 20 unit	34.398.973.700	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan rumah tangga pimpinan	3 rumah jabatan (gub, wagub dan Sekda)	3 rumah jabatan (gub, wagub dan Sekda)	4.000.000.000	3 rumah jabatan (gub, wagub dan Sekda)	6.000.000.000	3 rumah jabatan (gub, wagub dan Sekda)	5.500.000.000	3 rumah jabatan (gub, wagub dan Sekda)	3.324.000.000	3 rumah jabatan (gub, wagub dan Sekda)	9.000.000.000	15 rumah jabatan (gub, wagub dan Sekda)	27.824.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Outcome : Jumlah kenyamanan rumah jabatan secara baik	3 rumah jabatan (gub, wagub dan Sekda)	3 rumah jabatan (gub, wagub dan Sekda)	3.000.000.000	3 rumah jabatan (gub, wagub dan Sekda)	5.000.000.000	3 rumah jabatan (gub, wagub dan Sekda)	2.000.000.000	3 rumah jabatan (gub, wagub dan Sekda)	2.000.000.000	3 rumah jabatan (gub, wagub dan Sekda)	7.249.548.163	15 rumah jabatan (gub, wagub dan Sekda)	19.249.548.163	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Outcome : Jumlah kenyamanan rumah dinas secara baik	-	-	-	4 rumah dinas	1.000.000.000	4 rumah dinas	484.000.000	4 rumah dinas	532.400.000	4 rumah dinas	484.000.000	20 rumah dinas	2.500.400.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output : Jumlah aset bangunan dan gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan baik	1 Biro	1 Aset	200.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	200.000.000	Biro Barang dan Jasa	Palembang
			4.01.03.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output : Jumlah aset bangunan dan gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan baik	26 aset bangunan dan gedung kantor	26 aset bangunan dan gedung kantor	3.194.005.720	26 aset bangunan dan gedung kantor	6.000.000.000	26 aset bangunan dan gedung kantor	3.864.746.920	26 aset bangunan dan gedung kantor	2.749.733.577	26 aset bangunan dan gedung kantor	4.676.343.775	26 aset bangunan dan gedung kantor	20.484.829.992	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin dan baik	195 unit	195 unit	3.000.000.000	195 unit	6.350.000.000	195 unit	5.000.000.000	200 unit	3.993.000.000	200 unit	5.000.000.000	250 unit	23.343.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.02.32	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan	Output : Jumlah sarana dan prasarana peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara secara	7 aset bangunan dan gedung	7 aset bangunan dan gedung	300.000.000	7 aset bangunan dan gedung	1.000.000.000	7 aset bangunan dan gedung	1.000.000.000	7 aset bangunan dan gedung	399.300.000	7 aset bangunan dan gedung	450.000.000	35 aset bangunan	3.149.300.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang

				dan Perlengkap an Kantor	rutin dan baik	kantor	kantor		kantor		kantor	gedun g kantor		gedun g kantor		dan gedun g kantor				
		4.01.03.02.40	Rehabilitasi sedang/ berat rumah jabatan	Output : Jumlah paket kegiatan dan luas bangunan yang akan di rehab	4 Gedung	4 Gedung	4.972.275.000	4 Gedung	5.469.502.500	4 Gedung	3.557.238.111	4 Gedung	6.618.098.025	4 gedung	7.279.907.825	1 Gedung	27.897.021.461	Biro Umum dan Perlengkap an	Palembang	
		4.01.03.02.42	Rehabilitasi sedang/bera t gedung kantor	Output : Jumlah paket kegiatan dan luas bangunan gedung kantor yang akan di rehab	1 Gedung	1 Gedung	23.211.611.260	1 Gedung	11.500.000.000	1 Gedung	1.000.000.000	1 gedung	1.000.000.000	11 Kegiat an	1.996.500.000	65 Paket Kegiat an	38.708.111.280	Biro Umum dan Perlengkap an	Palembang	
		xx.xx.xx.xx	Rehabilitasi Gedung Biro Pemerintah an dan Otonomi Daerah Setda Prov Sumsel	Output : Jumlah paket kegiatan dan luas bangunan gedung kantor yang akan di rehab	-	-	0	1 Gedung	500.000.000	-	-	0	-	-	0	-	500.000.000	Biro Umum dan Perlengkap an	Palembang	
		xx.xx.xx.xx	Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Prov Sumsel	Output : Jumlah paket kegiatan dan Gedung Asrama Haji yang akan di rehab	-	-	0	1 Gedung	1.000.000.000	-	-	0	-	-	0	-	1.000.000.000	Biro Umum dan Perlengkap an	Palembang	
		xx.xx.xx.xx	Rehabilitasi Gedung Dharma Wanita Persatuan Rajawali Prov. Sumsel	Output : Jumlah paket kegiatan Gedung Dharma wanita Persatuan Rajawali yang akan di rehab	-	-	0	1 Gedung	750.000.000	-	0	-	0	-	0	-	750.000.000	Biro Umum dan Perlengkap an	Palembang	
		xx.xx.xx.xx	Rehabilitasi Gedung Vip Bandara SMB II Palembang	Output : Jumlah Paket kegiatan VIB Bandara SMB II yang di rehab	-	-	0	1 Gedung	1.500.000.000	1 Gedung	650.000.000	-	0	-	0	-	2.150.000.000	Biro Umum dan Perlengkap an	Palembang	
		xx.xx.xx.xx	Rehab Gedung Joeang/ DHD 45 Jakabaring Prov. Sumsel	Output : Jumlah Paket kegiatan Gedung Joeang Jakabaring Prov. Sumsel yang di rehab	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	Biro Umum dan Perlengkap an	Palembang	
		xx.xx.xx.xx	DED Asrama Haji Provinsi Sumatera Selatan	Output : Jumlah perencanaan bangunan Asrma Haji provinsi Sumatera Selatan	1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	396.950.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	396.950.000	Biro Umum dan Perlengkap an	Palembang	
		xx.xx.xx.xx	DED Pagar Kantor Gubernur Sumatera Selatan	Output : Jumlah perencanaan bangunan Pagar kantor Gubernur	1 kegiatan	1 kegiatan	98.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	98.000.000	Biro Umum dan Perlengkap an	Palembang	
		xx.xx.xx.xx	Rehabilitasi Gedung LVRI	Output : Jumlah Kegiatan Gedung LVRI Rajawali yang akan di Rehab	-	-	0	-	0	-	0	1 Gedung	815.000.000	-	0	-	815.000.000	Biro Umum dan	Palembang	

				Rajawali Prov. Sumsel															Perlengkapan	
		4.01.03.02.81	Pelayanan kesehatan KDH/WKDH	Output : Peningkatan pelayanan kesehatan KDH/WKDH Prov. Sumsel	8 orang	8 orang	17.640.000	8 orang	19.404.000	8 orang	21.344.400	8 orang	23.478.840	8 orang	25.826.724	40 orang	107.693.964	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang	
		4.01.03.02.83	Rehab Graha Gedung Serba Guna Jakabaring	Output : Jumlah kegiatan rehab	1 kegiatan	1 kegiatan	1.600.000.000	-	750.000.000	-	-	-	-	-	-	1 unit gedung	2.350.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang	
		4.01.03.02.xx	DED Pembangunan Masjid	Output : Jumlah perencanaan bangunan	1 kegiatan	1 kegiatan			227.120.985	-	-	-	-	-	1.724.300.000	1 bangunan	1.951.420.985	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang	
		4.01.03.02.xx	Renovasi Lapangan Tennis Griya Agung	Output : Jumlah paket kegiatan Renov Lapangan Tennins Griya Agung yang akan di rehab	2 Lapangan	2 Lapangan	862.150.000	-	-	-	-	2 lapangan	862.150.000	1 bangunan			1.724.300.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang	
		4.01.03.02.xx	Pembangunan Masjid di lingkungan Setda Prov. Sumsel	Output : Jumlah bangunan masjid	-	-	-	-	-	1 Bangunan	4.441.088.799	-	-	-	-	1 bangunan	4.441.088.799	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang	
		4.01.03.02.xx	Rehabilitasi Mushollah di Lingkungan Sekretariat Daerah	Output : Prosentase Rehabilitasi Mushollah di Lingkungan Setda Provinsi Sumsel	-	-	-	1 unit	2.600.000.000	-	-	-	-	-	-	1 unit	2.600.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang	
		xxxxxx	Program Dukungan Penguatan Peran dan Kompetensi Staf Ahli KDH dalam Mendukung Tugas dan Fungsi KDH	Outcome : Persentase Dukungan Penguatan Peran dan Kompetensi Staf Ahli KDH dalam mendukung tugas dan Fungsi KDH	100%	100%	1.608.250.000	100%	5.772.879.015	1005	6.119.000.000	100%	6.119.000.000	100%	6.119.000.000	100%	25.738.129.015			
		xxxxxx	Rapat Koordinasi Daerah Staf Ahli Kepala Daerah	Output : Jumlah Dokumen Rakor	Dokumen	1 Keg	157.000.000	1 Keg	354.629.015	1 Keg	314.000.000	1 Keg	314.000.000	1 Keg	314.000.000	1 Keg	1.453.629.015	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang	
		xxxxxx	Fokus Group Discussion Staf Ahli	Output : Jumlah Dokumen FGD	Dokumen	3 FGD	642.000.000	3 FGD	2.299.500.000	3 FGD	2.568.000.000	3 FGD	2.568.000.000	3 FGD	2.568.000.000	3 FGD	10.645.500.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang	

				Kepala Daerah																			
			xxxxxx	Pemberdayaan dan peningkatan Staf Ahli Gubernur	Output : Jumlah Laporan	Laporan	3 Orang	809.250.000	3 Orang	3.118.750.000	3 Orang	3.237.000.000	3 Orang	3.237.000.000	3 Orang	3.237.000.000	3 Orang	13.639.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang			
			4.01.03.00.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Outcome : Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	1.608.250.000	100%	5.772.879.015	1005	6.119.000.000	100%	6.119.000.000	100%	6.119.000.000	100%	25.738.129.015		Palembang			
			xxxxxx	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan normal	0	0	0	0	0	6 Aparatur Sipil Negara	0	6 Aparatur Sipil Negara	0	6 Aparatur Sipil Negara	0	18 Aparatur Sipil Negara	0	Biro Pemerintah dan otonomi Daerah	Palembang			
			xxxxxx	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Output : Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	0	0	0	6 Aparatur Sipil Negara	0	6 Aparatur Sipil Negara	0	6 Aparatur Sipil Negara	0	18 Aparatur Sipil Negara	0	Biro Pemerintah dan otonomi Daerah	Palembang			
			4.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan formal	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan normal	0	0	-	3 orang	42.585.000	2 orang	42.355.000	2 orang	44.250.000	2 orang	44.250.000	9 orang	173.440.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang			
			4.01.03.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Output : Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	0	0	-	1 orang	7.415.000	2 orang	27.645.000	2 orang	25.750.000	2 orang	25.750.000	7 orang	86.560.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang			
			4.01.03.05.xx	Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti Benchmarking	0	3 orang	30.750.000	0	-	0	-	0	-	0	-	3 orang	30.750.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang			
			4.01.03.05.xx	Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti capacity building	0	3 orang	40.700.000	0	-	0	-	0	-	0	-	3 orang	40.700.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang			
			4.01.03.05.xx	Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah	Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking	0	3 orang	25.750.000	0	-	0	-	0	-	0	-	3 orang	25.750.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang			
			4.01.03.05.xx	Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP	0	3 orang	23.700.000	0	-	0	-	0	-	0	-	3 orang	23.700.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang			
			4.01.03.05.85	Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID SAKIP)	Output : Jumlah Aparatur yang di Bina	-	-	0	2 orang	20.000.000	-	0	-	0	-	0	2 orang	20.000.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang			

			4.01.03.00.05.36	Pendidikan dan Pelatihan formal	Output : Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	3 Orang	7 Orang	-	6 Orang	106.000.000	6 Orang	112.360.000	6 Orang	119.101.600	6 Orang	126.247.696	31 Orang	463.709.296	Biro Kesra	Palembang
			4.01.03.00.05.85	Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Kesra	Palembang
			xx.xx.xx.xx	Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID)	Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking	3 Orang	3 Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Biro Kesra	Palembang
			xx.xx.xx.xx	Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan	Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Capacity Building	3 Orang	3 Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Biro Kesra	Palembang
			xx.xx.xx.xx	Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID)	Output : Jumlah Aparatur yang Mengikuti Benchmarking	3 Orang	3 Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Biro Kesra	Palembang
			xx.xx.xx.xx	Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek SAKIP	3 Orang	3 Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Biro Kesra	Palembang
			4.01.03.05.36	Pendidikan dan Pelatihan formal	Output : Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	-	-	-	2 orang	20.000.000	-	-	-	-	-	-	2 orang	20.000.000	Biro Perekonomian	Palembang
			4.01.03.05.21	Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti Benchmarking	3 orang	3 orang	30.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 orang	30.750.000	Biro Perekonomian	Surabaya
			4.01.03.05.22	Capacity Building SDM Aparatur	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti Capacity Building	3 orang	3 orang	40.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 orang	40.700.000	Biro Perekonomian	Jakarta

				Bidang Perencanaan (DID Kinerja Perencanaan Terbaik)																
			4.01.4.01.03.23	Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti Benchmarking	3 orang	3 orang	25.750.000	-	-	-	-	-	-	-	3 orang	25.750.000	Biro Perekonomian	Yogyakarta	
			4.01.4.01.03.24	Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP dengan Nilai A)	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP	3 orang	3 orang	23.700.000	-	-	-	-	-	-	-	3 orang	23.700.000	Biro Perekonomian	Jakarta	
			4.01.4.01.03.05.xx	Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Output: Jumlah Aparatur yang mengikuti pembinaan SAKIP	-	-	-	4 orang	47.100.000	-	-	-	-	-	4 orang	47.100.000	Biro Perekonomian	Luar Daerah	
			4.01.03.00.05.36	Pendidikan dan Pelatihan formal	Output : Jumlah ASN yang mengikuti Diklat PIM III dan IV	2 orang	2 orang	42.000.000	6 orang	140.000.000	3 orang	60.000.000	2 orang	45.000.000	1 orang	25.000.000	14 orang	312.000.000	Biro administrasi pembangunan	Palembang
			4.01.03.00.05.03	Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Kepegawaian dan Pengelolaan Aset	Output : Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan, Kepegawaian dan Pengelolaan ASET	0 orang	10 orang	121.000.000	10 orang	60.000.000	20 orang	140.000.000	20 orang	155.000.000	25 orang	175.000.000	85 orang/ kali	651.000.000	Biro administrasi pembangunan	Palembang
			4.01.03.00.xx	Kontribusi Seminar, Simposium	Output : Jumlah Seminar, Pelatihan yang diikuti	-	10 Kali	100.000.000	20 Kali	200.000.000	20 Kali	200.000.000	20 Kali	200.000.000	20 Kali	200.000.000	20 Kali	900.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD
			4.01.03.00.xx	Bintek Pengadaan Barang/Jasa	Output : Jumlah Bintek yang diadakan	-	1 Kali	200.000.000	4 kali	800.000.000	4 kali	800.000.000	4 kali	800.000.000	4 kali	800.000.000	4 kali	3.400.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD

			4.01.03.00.77.03	Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ dan Bahan Rapat	Output : Jumlah Laporan dan Bahan Rapat yang dikelola			1 Dokumen	13.550.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	43.550.000	Biro Pengadaan Barang / Jasa	Palembang	
			4.01.03.00.05.55	Penyelesaian Sengketa Kontrak	Output : Jumlah sengketa yang pengadaan barang yang diselesaikan	-	3 Bulan	100.000.000	1 Tahun	50.000.000	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	300.000.000	1 Tahun	1.050.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD
			4.01.03.00.05.56	Pembinaan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	Output : Jumlah Pejabat Fungsional	-	-	0	30 Orang	100.000.000	30 Orang	300.000.000	30 Orang	300.000.000	30 Orang	300.000.000	30 Orang	1.000.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD
			4.01.03.00.05.57	Pembinaan Lembaga Pengadaan Kabupaten/Kota	Output ; Jumlah pembinaan yang dilakukan	-	-	0	17 Kab/Kota	100.000.000	17 Kab/Kota	400.000.000	17 Kab/Kota	400.000.000	17 Kab/Kota	400.000.000	17 Kab/Kota	1.300.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD
			4.01.03.00.05.66	Rapat Koordinasi (Rakor) LPSE Se-Sumsel	Output : Jumlah Rakor yang dilaksanakan	-	-	0	1 Kali	75.000.000	1 Kali	150.000.000	1 Kali	150.000.000	1 Kali	150.000.000	1 Kali	525.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD
			4.01.03.00.05.67	Pengembangan Aplikasi SPSE ver. 4.3	Output : Jumlah Aplikasi	-	-	0	1 Aplikasi	50.000.000	-	0	-	0	-	0	1 Aplikasi	50.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD
			4.01.03.00.05.68	Bintek SPSE Versi 4.3 Bagi Penyedia	Output : Jumlah Orang yang mengikuti Bintek	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	Biro Barang dan Jasa	OPD
			4.01.03.00.05.69	Bintek Aplikasi SPSE	Output :Jumlah Orang yang mengikuti Bintek	-	-	0	-	0	150 org	150.000.000	150 org	150.000.000	150 org	150.000.000	450 orang	450.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD
			4.01.03.00.05.70	Pelatihan Sirup Versi 4.3 Bagi OPD Dilingkungan Pemerintah Prov Sumsel	Output : Jumlah Orang yang mengikuti Bintek	-	-	0	100 orang	100.000.000	-	0	-	0	-	0	100 orang	100.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD
			4.01.03.00.05.70	Pelatihan Sirup bagi OPD Dilingkungan Pemerintah Prov Sumsel	Output : Jumlah Orang yang mengikuti Bintek	-	-	0	-	0	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	100 orang	100.000.000	300 orang	300.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD
			4.01.03.00.05.71	Monev LPSE 17 Kabupaten/ Kota	Output : Jumlah Kab/Kota Yang mengikuti	-	-	0	17 Kab/Kota	100.000.000	17 Kab/Kota	300.000.000	17 Kab/Kota	300.000.000	17 Kab/Kota	300.000.000	17 Kab/Kota	1.000.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD
			4.01.03.00.05.72	Aplikasi Dashboard Pengadaan Barang/Jasa	Output : Jumlah aplikasi	-	-	0	1 Aplikasi	100.000.000	1 Aplikasi	100.000.000	1 Aplikasi	100.000.000	1 Aplikasi	100.000.000	1 Aplikasi	400.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD
			4.01.03.00.05.73	Sewa Rak Colloction / DRC Server LPSE	Output : Jumlah Rak yang di sewa	-	-	0	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	100.000.000	1 Tahun	400.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD
			4.01.03.00.05.74	Sosialisasi Perpres dan Perlem	Output : Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi	-	-	0	-	0	2 kali	200.000.000	2 kali	200.000.000	2 kali	200.000.000	6 kali	600.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD
			4.01.03.00.03.05	Pakaian Hari-hari tertentu	Output : Jumlah Pakaian Hari-hari tertentu yang tersedia	-	-	0	120 Stel	120.000.000	-	0	-	0	-	0	-	120.000.000	Biro Pengadaan Barang / Jasa	Palembang
			4.01.03.00.xx	Sewa	Output : Jumlah kapasitas	-	-	0	1 Tahun	0	1 Tahun		1		1		1		Biro Barang	OPD

			4.01.03.00.xx	Internet ULP (terabite)	Output : Jumlah Video	-	1 paket	100.000.000	0	0	0	300.000.000	Tahun	300.000.000	Tahun	300.000.000	Tahun	900.000.000	dan Jasa	OPD
			4.01.03.00.xx	Sosialisasi PBJ melalui Video	Output : Jumlah Website	-	1 website	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1 paket	100.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD	
			4.01.03.00.xx	Pembuatan Website Biro PBJ	Output : Jumlah Website	-	-	0	0	1 Website	50.000.000	1 Website	50.000.000	1 Website	50.000.000	1 website	150.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD	
			4.01.03.00.xx	Pengembangan Website Biro PBJ	Jumlah Dokumen	-	1 Dok	150.000.000	0	0	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	1 Dok	600.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD	
			4.01.03.00.xx	Penyusunan E - Katalog Lokal	Jumlah Dokumen	-	-	0	0	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 Dok	50.000.000	1 website	150.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD	
			4.01.03.00.xx	Pengelolaan E - Katalog Lokal	Jumlah Paket	-	-	0	0	1 Tahun	275.000.000	1 Dok	275.000.000	1 Dok	275.000.000	1 website	825.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD	
			4.01.03.00.xx	Monitoring dan evaluasi pelaporan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Paket	-	-	0	0	1 Tahun	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 website	450.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD	
			4.01.03.00.xx	strategi pengadaan barang dan jasa	Jumlah Paket	-	-	0	0	1 Tahun	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 Dok	150.000.000	1 website	450.000.000	Biro Barang dan Jasa	OPD	
			4.01.03.05.85	Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Output: Terbinanya SAKIP Perangkat Daerah	-	-	0	49 PD	73.400.000	49 PD	73.400.000	49 PD	73.400.000	49 PD	49 PD	293.600.000	Biro Pengadaan Barang / Jasa	Palembang	
			4.01.03.00.77.03	Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ dan Bahan Rapat	Output : Jumlah Laporan dan Bahan Rapat yang dikelola	-	-	0	1 Dokumen	13.550.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	4 Dokumen	43.550.000	Biro Pengadaan Barang / Jasa	Palembang	
			4.01.03.05.79	Pembinaan Pelaksanaan Kinerja ASN	Output : Terselenggaranya Pembinaan Kinerja ASN	0	0	0	9 Biro	100.000.000	9 Biro	100.000.000	9 Biro	100.000.000	9 Biro	9 Biro	400.000.000	Biro Organisasi	Palembang	
			4.01.03.05.80	Pembinaan Pendataan Terkini Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Provinsi Sumsel	Output : Pendataan Terkini Administrasi Kepegawaian	0	0	0	9 Biro	100.000.000	9 Biro	100.000.000	9 Biro	100.000.000	9 Biro	9 Biro	400.000.000	Biro Organisasi	Palembang	
			4.01.03.05.85	Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Output : Terbinanya SAKIP Perangkat Daerah	49 PD	49 PD	23.700.000	49 PD	73.400.000	49 PD	73.400.000	49 PD	73.400.000	49 PD	49 PD	317.300.000	Biro Organisasi	Palembang	
			4.01.03.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output : Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	4 orang	4 orang	81.777.000	6 orang	89.954.700	8 orang	98.950.170	10 orang	108.845.187	12 orang	119.729.705	38 orang	499.256.762	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang

			4.01.03.05.03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	9 orang	9 orang	50.000.000	10 orang	55.000.000	11 orang	60.500.000	11 orang	66.550.000	12 orang	73.205.000	53 orang	305.255.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.05.21	Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID)	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti Benchmarking	3 orang	3 orang	30.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 orang	30.750.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.05.22	Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti Capacity Building	3 orang	3 orang	40.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 orang	40.700.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.05.23	Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID)	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti Benchmarking	3 orang	3 orang	25.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 orang	25.750.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.05.24	Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek SAKIP	3 orang	3 orang	23.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3 orang	23.700.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.05.xx	Pembinaan SAKIP Perangkat Daerah /DID Kinerja SAKIP	Output : Jumlah Orang yang Mengikuti BIMTEK	4 orang	4 Orang	0	4 Orang	73.000.000	4 Orang	-	4 Orang	-	4 Orang	-	4 Orang	73.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan	9 Biro
			xx.xx.xx.xx	Pengadaan Pakaian KOPRI	Output : Jumlah Pakaian KORPRI berserta kelengkapannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biro Umum dan Perlengkapan	9 Biro
			4.01.03.05.01	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output : Jumlah Kapasitas Sumber Daya Aparatur PIM II : 1 org x 1 kali, PIM III : 1 org x 1 kali, PIM IV : 2 org x 1 kali	100%	75%	92.711.000	75%	92.711.000	80%	115.000.000	80%	125.000.000	80%	130.000.000	80%	555.422.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang
			4.01.03.00.03	Program Peningkata	Outcome : Persentase Kedisiplinan Aparatur	100%	100%	2.699.300.000	100%	7.966.714.000	100%	3.782.621.840	100%	4.278.424.150	100%	4.699.424.599	100%	23.426.484.590		Palembang

				n Disiplin Aparatur																
			xx.xx.xx.xx	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Output : Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya yang Tersedia	0	0	0	0	0	44 Set Pakaian Dinas	0	0	0	44 Set Pakaian Dinas	0	88 Set Pakaian Dinas	0	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	
			xx.xx.xx.xx	Pengadaan Pakaian Dinas Hari-hari Tertentu	Output : Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang Tersedia	0	0	0	0	0	44 Set Pakaian Dinas	0	0	0	44 Set Pakaian Dinas	0	88 Set Pakaian Dinas	0	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	
			4.01.03.00.03.05	Pakaian Hari-hari tertentu	Output : Jumlah Pakaian Hari-hari tertentu yang tersedia	0	0	-	70 stel pakaian hari-hari tertentu	68.250.000	70 stel pakaian hari-hari tertentu	68.250.000	70 stel pakaian hari-hari tertentu	68.250.000	70 stel pakaian hari-hari tertentu	68.250.000	280 stel pakaian hari-hari tertentu	273.000.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang
			4.01.03.00.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Output : Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapan yang tersedia	0	0	-	56 Orang	71.232.000	56 Orang	75.505.920	56 Orang	80.036.275,20	56 Orang	84.838.451,71	56 Orang	311.612.646,91	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Palembang
			4.01.03.00.03.02	Pengadaan pakaian KORPRI	Output : Jumlah Pakaian KORPRI yang tersedia	0	0	-	41 Orang	34.768.000	41 Orang	36.854.080	41 Orang	39.065.324,80	41 Orang	41.409.244,29	41 Orang	152.096.649,09	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Palembang
			4.01.03.00.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Output : Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0	-	56 Orang	142.464.000	56 Orang	151.011.840	56 Orang	160.072.550,40	56 Orang	169.676.903,42	56 Orang	623.225.293,82	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Palembang
			4.01.03.01.02	Pengadaan Pakaian Dinas dan atribut kelengkapan pakaian dinas	Output : Jumlah Pegawai yang mendapat Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	-	-	-	45 Orang	166.000.000	-	-	-	-	45 Orang	166.000.000	Biro Perekonomian	Palembang
			4.01.03.00.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Output : Jumlah Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	0	0	-	50 orang	200.000.000	50 orang	200.000.000	50 orang	200.000.000	50 orang	200.000.000	250 orang	800.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.03.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Output : Jumlah pakaian dinas yang dibuat untuk KDH/WKDH, Pejabat Ess.I s/d IV dan Staf serta unsur pengamanan dan pengawalan	2 stel	2 stel	1.500.000.000	2 stel	5.800.000.000	2 stel	1.500.000.000	2 stel	2.000.000.000	2 stel	2.196.150.000	10 stel	12.996.150.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang

			4.01.03.03.09	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang acara HUT RI	Output : Meningkatnya disiplin aparaturnya melalui peringatan HUT Proklamasi kemerdekaan RI dengan tertib dan hikmah	7 spanduk, 1 neon sign, 1 dok.albu m, 1 dok.video , 3720 nasi ktk, 1400 porsi prasman an, 7727 snack kotak, 1797 porsi snack prasman an, 4 paket dekorasi bunga, 2 paket hadiah lomba, 2500 undanga n, 1 unit tenda 30x5m, 1000 kursi futura, 450 kursi lipat, 33 unit tenda biasa, sound system 40.000 Watt, 2 unit genset 100KVA, 9 unit AC, 8	7 spanduk, 1 neon sign, 1 dok.albu m, 1 dok.video , 3720 nasi ktk, 1400 porsi prasman an, 7727 snack kotak, 1797 porsi snack prasman an, 4 paket dekorasi bunga, 2 paket hadiah lomba, 2500 undanga n, 1 unit tenda 30x5m, 1000 kursi futura, 450 kursi lipat, 33 unit tenda biasa, sound system 40.000 Watt, 2 unit genset 100KVA, 9 unit AC, 8	1.000.000.000	spanduk, neon sign, dok.albu m, dok.video , nasi ktk, prasman an, snack kotak, porsi snack prasman an, paket dekorasi bunga, paket hadiah lomba, undanga n, unit tenda 30x5m, kursi futura, kursi lipat, unit tenda biasa, sound system 40.000 Watt, unit genset 100KVA, AC, kipas blower, 8 LED, pakaian kerja lapangan	1.300.000.000	spanduk, neon sign, dok.albu m, dok.video , nasi ktk, prasman an, snack kotak, porsi snack prasman an, paket dekorasi bunga, paket hadiah lomba, undanga n, unit tenda 30x5m, kursi futura, kursi lipat, unit tenda biasa, sound system 40.000 Watt, unit genset 100KVA, AC, kipas blower, 8 LED, pakaian kerja lapangan	1.210.000.000	spanduk, neon sign, dok.albu m, dok.video , nasi ktk, prasman an, snack kotak, porsi snack prasman an, paket dekorasi bunga, paket hadiah lomba, undanga n, unit tenda 30x5m, kursi futura, kursi lipat, unit tenda biasa, sound system 40.000 Watt, unit genset 100KVA, AC, kipas blower , 8	1.331.000.000	spanduk, neon sign, dok.albu m, dok.video , nasi ktk, prasman an, snack kotak, porsi snack prasman an, paket dekorasi bunga, paket hadiah lomba, undanga n, unit tenda 30x5m, kursi futura, kursi lipat, unit tenda biasa, sound system 40.000 Watt, unit genset 100KVA, AC, kipas blower , 8	1.464.100.000	spanduk, neon sign, dok.albu m, dok.video , nasi ktk, prasman an, snack kotak, porsi snack prasman an, paket dekorasi bunga, paket hadiah lomba, undanga n, unit tenda 30x5m, kursi futura, kursi lipat, unit tenda biasa, sound system 40.000 Watt, unit genset 100KVA, AC, kipas blower , 8	6.305.100.000	spanduk, neon sign, dok.albu m, dok.video , nasi ktk, prasman an, snack kotak, porsi snack prasman an, paket dekorasi bunga, paket hadiah lomba, undanga n, unit tenda 30x5m, kursi futura, kursi lipat, unit tenda biasa, sound system 40.000 Watt, unit genset 100KVA, AC, kipas blower , 8	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
--	--	--	---------------	--	---	---	---	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------------------	-----------

						unit kipas blower, 8 LED, pakaian kerja lapangan 80 stel	unit kipas blower, 8 LED, pakaian kerja lapangan 80 stel					LED, pakaian kerja lapangan		LED, pakaian kerja lapangan		LED, pakaian kerja lapangan				
			4.01.03.01.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Output : Jumlah Pegawai yang mendapat Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	109	109 Orang/2 stel	199.300.000	109 Orang/2 stel	350.000.000	109 Orang	375.000.000	109 Orang	400.000.000	109 Orang	475.000.000	109 Orang	1.799.300.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang
			4.01.03.06	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Kinerja dan Keuangan	Outcome : Persentase Laporan yang Dikelola	100%	100%	425.000.000	100%	494.800.000	100%	548.990.000	100%	564.835.400	100%	602.442.524	100%	2.636.067.924		Palembang
			xx.xx.xx.xx	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Output : Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran yang Disusun	0	0	0	0	20 RKA	0	20 RKA	0	20 RKA	0	60 RKA	0	0	Biro Pemerintah dan otonomi Daerah	Palembang
			4.01.03.05.88	Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah (Dana Insentif Daerah Kinerja SAKIP)	Output : Jumlah Dokumen SAKIP yang disusun	-	-	0	100%	26.600.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	20.000.000	100%	86.600.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang
			4.01.03.06.xx	Kegiatan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Internal Biro kesejahteraan Rakyat	Output : Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Internal Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	33.920.000	1 Dokumen	35.955.200	1 Dokumen	38.112.512	1 Dokumen	139.987.712	Biro Kesra	Palembang
			4.01.03.06.xx	Kegiatan Pengelolaan Ketatausahaan dan Evaluasi Internal Biro Kesejahteraan Rakyat	Output : Jumlah Pengelolaan Ketatausahaan dan Evaluasi Internal Biro Kesejahteraan Rakyat	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	32.000.000	1 Dokumen	33.920.000	1 Dokumen	35.955.200	1 Dokumen	38.112.512	1 Dokumen	139.987.712	Biro Kesra	Palembang
			4.01.03.06.19	Penyusunan LAKIP Perangkat	Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis LAKIP	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 orang	0	Biro Kesra	Palembang

				Daerah (DID Kinerja SAKIP)																
			4.01.03.06.xx	Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Output : Jumlah Laporan yang disusun	-	-	-	1 Laporan	26.600.000	1 Laporan	49.400.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	50.000.000	4 Laporan	166.000.000	Biro Perekonomian	OPD
			4.01.03.06.22	Penyusunan RENSTRA Setda	Output : menyediakan Dokumen RENSTRA Setda	NA	1 Dok	100.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 Dok	100.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.06.19	Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Output : Tersusun SAKIP Perangkat Daerah	49 PD	49 PD	100.000.000	49 PD	26.600.000	49 PD	100.000.000	49 PD	100.000.000	49 PD	100.000.000	49 PD	426.600.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output : Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	10 dokumen	10 dokumen	50.000.000	10 dokumen	55.000.000	10 dokumen	60.500.000	10 dokumen	66.550.000	10 dokumen	73.205.000	50 dokumen	305.255.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.06.06	Penyusunan RKA/DPA	Output : Jumlah Buku RKA/DPA	60 buku RKA & RKAP-DPA & DPPA Setda	60 buku RKA & RKAP-DPA & DPPA Setda	50.000.000	60 buku RKA & RKAP-DPA & DPPA Setda	55.000.000	60 buku RKA & RKAP-DPA & DPPA Setda	60.500.000	60 buku RKA & RKAP-DPA & DPPA Setda	66.550.000	60 buku RKA & RKAP-DPA & DPPA Setda	73.205.000	300 buku RKA & RKAP-DPA & DPPA Setda	305.255.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.06.08	Inventarisasi aset di lingkungan Setda	Output : Jumlah buku inventarisasi aset Pemprov. Sumsel	12 dokumen, KIB A-KIB E	12 dokumen, KIB A-KIB E	25.000.000	12 dokumen, KIB A-KIB E	55.000.000	12 dokumen, KIB A-KIB E	60.500.000	12 dokumen, KIB A-KIB E	66.550.000	12 dokumen, KIB A-KIB E	73.205.000	60 dokumen, KIB A-KIB E	280.255.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.06.12	Pendataan dan penataan Arsip aktif dan non aktif	Output : Jumlah pendataan dan penataan arsip aktif dan non aktif	2.000 arsip	2.000 arsip	25.000.000	2.000 arsip	60.000.000	2.000 arsip	30.250.000	2.500 arsip	33.275.000	2.500 arsip	36.602.500	11.000 arsip	185.127.500	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.06.18	Penyusunan Standar Satuan Harga	Output : Jumlah Buku Standar satuan harga Pemprov. Sumsel	60 set	60 set	25.000.000	60 set	50.000.000	60 set	50.000.000	60 set	50.000.000	60 set	50.000.000	300 set	225.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.06.xx	Penyelesaian	Output : Jumlah Hutang	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	250.000.000	Biro Umum	Palembang

				n Kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Pemprov Sumsel yang harus dibayar	Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan			dan Perlengkapan		
			4.01.03.06.xx	Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah	Output : Jumlah LAKIP Perangkat Daerah yang Disusun	-	-	0	1 Dokumen	26.000.000	-	0	-	0	-	0	1 Dokumen	26.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.00.77	Program Peningkatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Outcome: Persentase Peningkatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	100%	100%	515.000.000	100%	463.550.000	100%	620.000.000	100%	675.000.000	100%	730.000.000	100%	3.003.550.000		Palembang
			4.01.03.00.77.01	Pembinaan SAKIP Kab./Kota se-Sumsel dan Penyusunan SAKIP Pemprov Sumsel	Output : Menyediakan Dokumen SAKIP Prov. Sumsel	1 Dok	1 Dok	325.000.000	1 Dok	300.000.000	1 Dok	375.000.000	1 Dok	400.000.000	1 Dok	425.000.000	1 Dok	1.825.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.77.02	Bimbingan Teknis SAKIP Provinsi dan Kab./Kota	Output : Meningkatkan Pemahaman ASN dalam penyusunan SAKIP	49 PD dan 17 Kab/Kota	49 PD dan 17 Kab/Kota	140.000.000	49 PD dan 17 Kab/Kota	100.000.000	49 PD dan 17 Kab/Kota	175.000.000	49 PD dan 17 Kab/Kota	200.000.000	49 PD dan 17 Kab/Kota	225.000.000	49 PD dan 17 Kab/Kota	840.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.77.03	Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ dan Bahan Rapat	Output : Jumlah Laporan dan Bahan Rapat yang Dikelola	3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	60.000.000	3 Dokumen	65.000.000	3 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	295.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.77.03	Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ dan Bahan Rapat	Output : Jumlah Laporan dan Bahan Rapat yang Dikelola	-	-	0	1 Dokumen	13.550.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	4 Dokumen	43.550.000	Biro Pengadaan Barang / Jasa	Palembang
			4.01.03.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah	Outcome : Presentase Anggota Dewan yang Meningkatkan Kapasitas nya	100%	100%	200.000.000	100%	450.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	250.000.000	100%	1.350.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang
			4.01.03.15.10	Verifikasi Anggota DPRD Prov/Kab/Kota Tahun 2019-2024 dan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Prov/Kab/Kota yang terverifikasi	Output : Jumlah Dokumen Anggota DPRD Prov/Kab/Kota Tahun 2019-2024 Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Prov/Kab/Kota yang terverifikasi	65 Dokumen	705 Dokumen	130.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	705 Dokumen	130.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang

			4.01.03.15.10	Prov/Kab/Kota	Verifikasi Pengganti Antar Waktu DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota	Output :Jumlah Dokumen Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang terverifikasi	65 Dokumen	0	0	42 Dokumen	200.000.000	44 Dokumen	100.000.000	46 Dokumen	150.000.000	48 Dokumen	150.000.000	50 Dokumen	600.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang
			4.01.03.15.09	Penyelenggaraan Kunjungan Kerja Lembaga Legislatif di Provinsi Sumatera Selatan	Output : Jumlah Kunjungan DPRD RI, DPR RI, DPRD Prov/Kab/Kota yang difasilitasi	40 Kali	50 Kali	70.000.000	50 Kali	250.000.000	50 Kali	100.000.000	50 Kali	100.000.000	50 Kali	100.000.000	250 Kali	620.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang	
			4.01.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Outcome : Prosentase Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang Meningkatkan Pelayanannya	100%	100%	685.000.000	100%	2.351.000.000	100%	2.621.000.000	100%	3.400.000.000	100%	3.600.000.000	100%	12.657.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel		
			4.01.03.16.01	Penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD)	Output : Jumlah buku RLPPD yang di susun	10 Buku	10 Buku	0	10 Buku	350.000.000	10 Buku	350.000.000	10 Buku	350.000.000	10 Buku	350.000.000	50 Buku	1.400.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang	
			4.01.03.16.08	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Output : Jumlah buku LPPD Prov. Sumsel	50 Buku	50 Buku	150.000.000	50 Buku	350.000.000	50 Buku	350.000.000	50 Buku	300.000.000	50 Buku	300.000.000	250 Buku	1.450.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang	
			4.01.03.16.09	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Selatan	Output : Jumlah buku LKPJ Gubernur Sumsel Akhir Tahun Anggaran	3 buku	3 buku	100.000.000	3 buku	350.000.000	3 buku	350.000.000	3 buku	300.000.000	3 Dok	350.000.000	15 Dok	1.450.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang	
			4.01.03.16.13	Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Sumsel ke Luar Negeri	Output : Jumlah Izin yang diterbitkan/dikeluarkan	37Surat	15 Surat	125.000.000	45 Surat	200.000.000	50 Surat	200.000.000	55 Surat	150.000.000	58 Surat	150.000.000	223 Surat	825.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang	
			4.01.03.16.19	Penyelenggaraan Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh	Output : Jumlah Partisipasi Aktif Provinsi dalam APPSI	6 Kali Rapart/ Pertemuan	6 Kali Rapart/ Pertemuan	250.000.000	6 Kali Rapart/ Pertemuan	250.000.000	6 Kali Rapart/ Pertemuan	250.000.000	6 Kali Rapart/ Pertemuan	300.000.000	6 Kali Rapart/ Pertemuan	300.000.000	30 Kali Rapart/ Pertemuan	1.350.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov.	Palembang	

				Indonesia (APPSI)														Sumsel	
		4.01.03.16.20	Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Output : Jumlah Kepala Daerah yang dilantik	8 KDH/WKDH	1 KDH/WKDH	0	7 KDH/WKDH	-	0	0	1 KDH/WKDH	400.000.000	8 KDH/WKDH	400.000.000	17 KDH/WKDH	800.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang
		4.01.03.16.23	Pembinaan dan Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Output : Jumlah Pembinaan dan Desk Pilkada yang dilaksanakan	8 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	250.000.000	0	0	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	550.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang
		4.01.03.16.25	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan	Output : Jumlah Kecamatan yang dibina dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	34 Kec	34 Kec	60.000.000	75 Kec	100.000.000	75 Kec	100.000.000	75 Kec	200.000.000	75 Kec	250.000.000	334 Kec	710.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang
		4.01.03.16.26	Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan Gubernur Sumsel	Output : Jumlah Buku Memori Jabatan yang disusun	10 Buku	0	0	0	0	0	0	0	0	10 Buku	50.000.000	10 Buku	50.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang
		4.01.03.16.XX	Penilaian Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sesuai Permendagri Nomor 4 Tahun 2010	Output : Jumlah Kecamatan yang telah melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	0	0	0	1 Lapaoran	-	1 Lapaoran	100.000.000	1 Lapaoran	200.000.000	1 Lapaoran	250.000.000	1 Lapaoran	550.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang
		4.01.03.16.XX	Pembinaan Aparatur Kelurahan tentang Dana Bantuan Kelurahan (Permendagri Nomor 130 Tahun 2018)	Output : Jumlah Aparatur Kelurahan yang dibina dalam pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Kelurahan	0	0	0	1170 Aparatur Kelurahan	350.000.000	1170 Aparatur Kelurahan	350.000.000	1170 Aparatur Kelurahan	400.000.000	1170 Aparatur Kelurahan	400.000.000	1170 Aparatur Kelurahan	1.500.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang
		4.01.03.16.XX	Pemantauan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Kelurahan di Kabupaten/Kota se Sumsel	Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Kelurahan di Provinsi Sumatera Selatan	0	0	0	1 laporan	151.000.000	1 laporan	221.000.000	1 laporan	350.000.000	1 laporan	350.000.000	1 laporan	1.072.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang
		4.01.03.16.XX	Pemantauan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Kelurahan sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) di	Output : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Kelurahan di Provinsi Sumatera	0	0	0	1 Laporan	-	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	950.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang

				Provinsi Sumsel	Selatan															
			4.01.03.27	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Outcome : Prosentase Tertatanya Daerah Otonomi Baru (DOB)	100%	100%	942.120.000	100%	2.300.000.000	100%	1.650.000.000	100%	1.766.000.000	100%	1.751.000.000	100%	8.409.120.000		
			4.01.03.27.01	Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan	Output : Jumlah Pembentukan Pemekaran Kecamatan	6 Kec	2 Kec	60.000.000	3 Kec	200.000.000	3 Kec	200.000.000	3 Kec	200.000.000	6 Kec	200.000.000	17 Kec	860.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang
			4.01.03.27.03	Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah	Output : Jumlah penyelesaian tapal batas	10 Batas Bermasal ah, 10 Pelacakan Batas, 3 Batas Provinsi dan Rekonstruksi Batas	10 Batas Bermasal ah, 10 Pelacakan Batas, 3 Batas Provinsi dan Rekonstruksi Batas	547.120.000	10 Batas Bermasal ah, 10 Pelacakan Batas dan Rekonstruksi Batas	800.000.000	10 Batas Bermasal ah, 10 Pelacakan Batas dan Rekonstruksi Batas	500.000.000	10 Batas Bermasal ah, 10 Pelacakan Batas dan Rekonstruksi Batas	10 Batas Bermasal ah, 10 Pelacakan Batas dan Rekonstruksi Batas	500.000.000	40 Batas Bermasal ah, 40 Pelacakan Batas dan Rekonstruksi Batas	2.847.120.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang	
			4.01.03.27.05	Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten di Daerah Otonom Baru	Output : Jumlah Pembinaan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda yang dilaksanakan	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	166.000.000	1 Laporan	5 Laporan	517.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang	
			4.01.03.27.06	Pembakuan Rupa Bumi	Output : Jumlah Lokasi Penamaan Rupa Bumi yang teridentifikasi	3 Lokasi	3 Lokasi	90.000.000	3 Lokasi	200.000.000	3 Lokasi	200.000.000	3 Lokasi	200.000.000	3 Lokasi	15 Lokasi	890.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang	
			4.01.03.27.08	Perapatan, Pemeliharaan, Rekonstruksi dan Pemasangan Pilar Permanen Batas Provinsi, Kabupaten dan Kota	Output : Jumlah Pilar Permanen yang terpasang	20 Pilar	6 Pilar	120.000.000	60 Pilar	900.000.000	60 Pilar	500.000.000	60 Pilar	500.000.000	60 Pilar	246 Pilar	2.520.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang	
			4.01.03.27.10	Pembinaan dan Rapat Kerja Regulasi Otonomi Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah	Output : Jumlah Laporan Pembinaan dan Rapat Kerja Regulasi Otonomi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	125.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	1 Laporan	775.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang	
			4.01.03.55	Program Kerjasama Wilayah Perbatasan	Outcome : Prosentase Kerjasama yang terfasilitasi	100%	100%	245.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	600.000.000	100%	2.645.000.000		

			4.01.03.55.08	Pelaksanaan Pemantauan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kab/Kota di Prov. Sumsel	Output : Jumlah Kecamatan yang telah melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	5 Laporan	1.120.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang	
			4.01.03.55.01	Rapat Koordinasi Gubernur se SUMATERA	Output : Jumlah Rakorgub yang di ikuti	4 MoU (11 Provinsi se SUMATERA)	4 MoU (11 Provinsi se SUMATERA)	0	4 MoU (11 Provinsi se SUMATERA)	0	4 MoU (11 Provinsi se SUMATERA)	150.000.000	4 MoU (11 Provinsi se SUMATERA)	200.000.000	4 MoU (11 Provinsi se SUMATERA)	150.000.000	4 MoU (11 Provinsi se SUMATERA)	500.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang
			4.01.03.55.03	Koordinasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Antar Daerah, Luar Negeri dan Pihak Ketiga	Output : Jumlah Dokumen Kerjasama/MoU yang difasilitasi	18 MoU	20 MoU	125.000.000	30 MoU	300.000.000	35 MoU	200.000.000	40 MoU	200.000.000	45 MoU	170 MoU	1.025.000.000	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Sumsel	Palembang	
			4.01.4.01.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Outcome : Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	1.815.815.400	100%	2.725.000.000	100%	2.792.000.000	100%	2.885.750.000	100%	2.998.000.000	100%	13.216.565.400	Biro Hukum dan HAM	Palembang
			4.01.4.01.03.26.06	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah.	Output : Jumlah produk hukum Kab/Kota yang dapat dievaluasi, fasilitasi dan klarifikasi	140 Produk Hukum Kab/Kota	170 Produk Hukum Kab/Kota	265.000.000	170 Produk Hukum Kab/Kota	353.000.000	170 Produk Hukum Kab/Kota	355.000.000	170 Produk Hukum Kab/Kota	360.000.000	170 Produk Hukum Kab/Kota	850 Produk Hukum Kab/Kota	1.703.000.000	Biro Hukum dan HAM	Dalam dan luar Provinsi	
			4.01.4.01.03.26.07	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.	Output : Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang ditetapkan	14 Perda dan 50 Pergub	45 Perda & Pergub (10 Perda dan 35 Pergub)	498.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	45 Perda & Pergub (10 Perda dan 35 Pergub)	498.000.000	Biro Hukum dan HAM	Dalam dan luar Provinsi
			4.01.4.01.03.26.10	Penyusunan Himpunan Peraturan dan Penyebaran Informasi Hukum dan Dokumentasi Produk Hukum.	Output : Jumlah koleksi dan tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan pusat dan daerah	1 Kegiatan	240 buku	40.000.000	250 buku	120.000.000	200 buku	125.000.000	200 buku	130.000.000	200 buku	140.000.000	1.090 buku	555.000.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang
			4.01.4.01.03.26.11	Penyelesaian	Output : Jumlah perkara	7 Perkara	7 Perkara	396.025.000	8 Perkara	420.000.000	8 Perkara	425.000.000	9	430.000.000	9	440.000.000	41	2.111.025.000	Biro Hukum	Dalam dan

				n perkara yang menyangkut kepentingan hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.	yang menyangkut kepentingan Pemerintah Prov. Sumsel							Perkara		Perkara		Perkara		dan HAM	luar Provinsi	
			4.01.4.01.03.26.12	Penyuluhan Hukum	Output : Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum.	150 orang (3 Kab/Kota)	200 orang (4 Kab/Kota)	120.000.000	250 orang (5 Kab/Kota)	200.000.000	250 orang (5 Kab/Kota)	210.000.000	250 orang (5 Kab/Kota)	220.000.000	250 orang (5 Kab/Kota)	240.000.000	1.050 orang (21 Kab/Kota)	990.000.000	Biro Hukum dan HAM	Kab/Kota se Sumsel
			4.01.4.01.03.26.13	Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Daerah melalui media cetak	Output : Jumlah produk hukum daerah yang disebarluaskan melalui media cetak	4 Perda/Pergub	4 Perda/Pergub	70.000.000	8 Perda/Pergub	150.000.000	7 Perda/Pergub	152.000.000	7 Perda/Pergub	154.000.000	7 Perda/Pergub	160.000.000	33 Perda/Pergub	686.000.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang
			4.01.4.01.03.26.14	Penelitian dan penelaahan draft Keputusan Gubernur Sumsel	Output : Jumlah penelitian dan penelaahan draft Keputusan Gubernur Sumsel	700 Keputusan Gubernur	800 Keputusan Gubernur	65.000.000	780 Keputusan Gubernur	120.000.000	700 Keputusan Gubernur	125.000.000	700 Keputusan Gubernur	130.000.000	700 Keputusan Gubernur	150.000.000	3.680 Keputusan Gubernur	590.000.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang
			4.01.4.01.03.26.15	Pemberian bantuan Hukum cuma-cuma pada Masyarakat Miskin Sumsel	Output : Jumlah Bantuan Hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat miskin	1 Dokumen	8 kasus	100.000.000	8 kasus	110.000.000	8 kasus	120.000.000	8 kasus	125.750.000	8 kasus	130.000.000	40 kasus	585.750.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang
			4.01.4.01.03.26.17	Pemantauan dan evaluasi pendendalian program RANHAM dan koordinasi pelaksanaan HAM.	Output : Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pendendalian program RANHAM Provinsi dan koordinasi pelaksanaan RANHAM Kab/Kota.	2 laporan	4 laporan	86.790.400	4 laporan	200.000.000	4 laporan	210.000.000	4 laporan	220.000.000	4 laporan	225.000.000	20 laporan	941.790.400	Biro Hukum dan HAM	Dalam dan luar provinsi
			4.01.4.01.03.26.18	Pembinaan dan pengembangan Sistem Informasi Hukum di Provinsi Sumsel.	Output : Jumlah Kabupaten/kota yang dibina/ monitoring dan produk hukum provinsi yang updating/upload ke website.	65 Perda & Pergub	100 Perda & Pergub	75.000.000	110 Perda & Pergub	142.000.000	110 Perda & Pergub	145.000.000	110 Perda & Pergub	150.000.000	110 Perda & Pergub	153.000.000	540 Perda & Pergub	665.000.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang
			4.01.4.01.03.26.24	Koordinasi penyelesaian permasalahan hukum perdata, pidana dan Tata Usaha Negara (TUN)	Output : Jumlah rapat koordinasi penyelesaian permasalahan hukum perdata, pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) yang diselesaikan	-	4 kali	100.000.000	5 kali	350.000.000	5 kali	355.000.000	5 kali	364.000.000	5 kali	365.000.000	24 kali	1.534.000.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang
			4.01.4.01.03.26.xx	Rapat Koordinasi Karo Hukum dengan Kepala Bagian Hukum dan	Output : Terfasilitasinya Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	1 kali	85.000.000	1 kali	90.000.000	1 kali	92.000.000	1 kali	92.000.000	1 kali	359.000.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang

				Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota																
		4.01.4.01.03.26.xx		Penyusunan Peraturan Daerah	Output : Jumlah Peraturan Daerah	-	-	-	8 Perda	275.000.000	7 Perda	280.000.000	7 Perda	290.000.000	7 Perda	308.000.000	29 Perda	1.153.000.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang
		4.01.4.01.03.26.xx		Penyusunan Peraturan Gubernur	Output : Jumlah Peraturan Gubernur	-	-	-	37 Pergub	200.000.000	27 Pergub	200.000.000	27 Pergub	220.000.000	27 Pergub	225.000.000	118 Pergub	845.000.000	Biro Hukum dan HAM	Palembang
		4.01.03.00.47		Program Perumusan Kebijakan Bidang Keagamaan	Outcome : Persentase Bahan Kebijakan Bidang Keagamaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	449.435.000	100%	7.423.400.000	100%	6.915.000.000	100%	8.131.052.240	100%	#####	100%	#####	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Dserah
		4.01.03.00.47.04		Kegiatan Keagamaan Prov. Sumsel	Output : Jumlah Kegiatan Keagamaan yang Difasilitasi	1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000	---	0	---	0	---	0	---	0	1 Dokumen	90.000.000	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah
		4.01.03.00.47.04		Pelayanan Jamaah Haji	Output : Jumlah Fasilitas Pengawasan Embarkasi, Debarkasi Haji serta seleksi Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD)	---	---	0	2 kali dan 1 kali seleksi TPHD	901.000.000	2 kali dan 1 kali seleksi TPHD	955.060.000	2 kali dan 1 kali seleksi TPHD	1.012.363.600	2 kali dan 1 kali seleksi TPHD	1.073.105.416	8 kali dan 4 kali seleksi TPHD	3.941.529.016	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah
		4.01.03.00.47.12		Fasilitasi Keagamaan Provinsi Sumatera Selatan	Output : Rumusan Kebijakan Koordinasi, Evaluasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan	1 Dokumen	---	0	1 Dokumen	201.400.000	1 Dokumen	213.484.000	1 Dokumen	226.293.040	1 Dokumen	239.870.622,40	4 Dokumen	881.047.662,40	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah
		4.01.03.00.47.12		Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi Rumah Tahfidz	Output : Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan pendataan dan pembinaan rumah tahfidz	---	---	0	17 Kab/Kota dan 1 Dokumen Pembinaan	212.000.000	17 Kab/Kota dan 1 Dokumen Pembinaan	224.720.000	17 Kab/Kota dan 1 Dokumen Pembinaan	238.203.200	17 Kab/Kota dan 1 Dokumen Pembinaan	252.495.392	17 Kab/Kota dan 1 Dokumen Pembinaan	927.418.592	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah
		4.01.00.47.13		Pembinaan Nilai-nilai Keagamaan Prov. Sumsel	Output : Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pembinaan Nilai-Nilai Keagamaan	---	---	0	1 Dokumen	1.749.000.000	1 Dokumen	1.853.940.000	1 Dokumen	1.965.176.400	1 Dokumen	2.083.086.984	4 Dokumen	7.651.203.384	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah
		4.01.00.47.13		Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) Tingkat Provinsi Sumsel	Output : Jumlah Panitia STQ	---	15 Orang	122.311.000	---	0	---	0	---	0	---	0	15 Orang	122.311.000	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah
		4.01.03.00.47.13		Pemberangkatan Kafilah STQ ke Tingkat Nasional	Output : Jumlah yang Diberangkatkan	---	10 Orang	237.124.000	---	0	---	0	---	0	---	0	10 Orang	237.124.000	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah
		4.01.03.00.47.14		Fasilitasi MTQ/STQ	Output : Jumlah Fasilitas Pelaksanaan, Pelatihan dan Pemberangkatan MTQ/STQ	---	---	0	153 Pemenang, 57 Peserta, 100 Orang Kafilah Sumsel	3.300.000.000	75 Pemenang, 38 Peserta, 80 Orang Kafilah Sumsel	2.544.196.000	153 Pemenang, 57 Peserta, 100 Orang Kafilah Sumsel	3.498.000.000	75 Pemenang, 38 Peserta, 80 Orang Kafilah Sumsel	2.696.847.760	456 Pemenang, 190 Peserta, 860 Orang Kafilah Sumsel	12.039.043.760	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah
		4.01.03.00.47.14		Pendataan dan Registrasi Rumah Tahfidz Kab/Kota	Output : Jumlah Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan	---	1 Dokumen	0	---	0	---	0	---	0	---	0	1 Dokumen	0	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah
		4.01.03.00.47.21		Pemantauan	Output : Jumlah	---	---	0	17	212.000.000	17	224.720.000	17	238.203.200	17	252.495.392	68	927.418.592	Biro Kesra	Perangkat

				dan Evaluasi Penggunaan Dana Bantuan Gubernur di Bidang Keagamaan	Kab/Kota yang menerima Dana Bantuan Gubernur di Bidang Keagamaan				Kab/Kota										Setda Prov. Sumsel	Daerah	
		4.01.03.00.47.22		Pemberangkatan Kunjungan Religius	Output : Rumusan Kebijakan Pemberangkatan Kunjungan Rohani yang difasilitasi	---	---	0	1 Dokumen	530.000.000	1 Dokumen	561.800.000	1 Dokumen	595.508.000	1 Dokumen	631.238.480	4 Dokumen	2.318.546.480	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah	
		4.01.03.00.47.22		Pembinaan dan Pelatihan Bilal Mayit	Output : Jumlah Peserta	---	100 Orang	0	---	0	---	0	---	0	---	100 Orang	0	0	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah	
		4.01.00.47.22		Rapat Koordinasi Amil Zakat dan Wakaf se-Sumsel	Output : Rumusan Rekomendasi/ Laporan/Bahan Kebijakan	---	1 Dokumen	0	1 Dokumen	318.000.000	1 Dokumen	337.080.000	1 Dokumen	357.304.800	1 Dokumen	378.743.088	5 Dokumen	1.391.127.888	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah	
		4.01.03.00.47.26		Petugas Penghubung Urusan Keagamaan Desa (P2UKD)	Output : Jumlah P2UKD yang difasilitasi	---	---	0	3.318 Orang	Rp0,00	3.318 Orang	0	3.318 Orang	0	3.318 Orang	13.272 Orang	0	0	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah	
		xx.xx.xx.xx		Kegiatan Pemantauan dan Verifikasi Penerima Dana Bantuan Hibah di Bidang Keagamaan	Output : Jumlah Rekomendasi/Laporan/ Bahan Kebijakan	---	1 Dokumen	0	---	0	---	0	---	0	---	1 Dokumen	0	0	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah	
		4.01.03.00.48		Program Perumusan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Outcome : Persentase Bahan Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga yang ditindaklanjuti	100%	100%	0	100%	1.571.000.000	100%	2.645.760.000	100%	1.728.605.600	100%	2.871.651.936	100%	8.817.017.536	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah	
		4.01.03.00.48.08		Pengawasan dan Evaluasi terhadap Manajemen Pondok Pesantren	Output : Jumlah Kab/Kota	---	---	0	17 Kab/Kota	424.000.000	17 Kab/Kota	449.440.000	17 Kab/Kota	476.406.400	17 Kab/Kota	504.990.784	68 Kab/Kota	1.854.837.184	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah	
		4.01.03.00.48.08		Peningkatan Kesehatan dan Kebugaran Tubuh	Output : Jumlah ASN dan tenaga honorer yang mengikuti SKJ	---	---	0	300 Orang	307.000.000	300 Orang	325.420.000	300 Orang	344.945.200	300 Orang	365.641.912	1200 Orang	1.343.007.112	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah	
		4.01.03.00.48.09		Penyelenggaraan Festival Keagamaan	Output : Jumlah Fasilitas Pelaksanaan, Pelatihan dan Pemberangkatan Festival Keagamaan	---	---	0	18 Pemenang Qasidah, 6 Peserta TC Qasidah, 10 Orang Kafilah Keberangkatan Qasidah	840.000.000	9 grup dan 18 Pemenang Qasidah, 6 grup dan 6 Peserta TC Qasidah, 40 Orang Kafilah Keberangkatan	1.870.900.000	18 Pemenang Qasidah, 6 Peserta TC Qasidah, 10 Orang Kafilah Keberangkatan	9 grup dan 18 Pemenang Qasidah, 3 grup dan 6 Peserta TC Qasidah, 40 Orang	2.001.019.240	18 Grup, 72 Pemenang Qasidah, 6 Grup TC Qasidah, 24 Peserta TC	5.619.173.240	0	0	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah

										katan Qasidah		n Qasidah		Kafilah Keberangkatan Qasidah		Qasidah, 100 Orang Kafilah Keberangkatan Qasidah				
			4.01.03.00.59	Program Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan	Outcome : Persentase Bahan Kebijakan Bidang Kesejahteraan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	120.000.000	---	0	---	0	---	0	100%	120.000.000,00	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah		
			4.01.03.00.59.11	Peningkatan Tim Pembina UKS se-Sumsel	Output : Jumlah UKS Kab/Kota yang Dibina	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	120.000.000	--	0	---	0	---	0	17 Kab/Kota	120.000.000	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah		
			4.01.03.00.59.11	Rakor Kesra se-Sumsel	Output : Jumlah peserta yang mengikuti	---	---	0	---	0	---	0	---	0	---	0	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah		
			4.01.03.00.59	Program Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan	Outcome : Persentase Bahan Kebijakan Bidang Kesejahteraan, Kesehatan, dan Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti	100%	100%	0,00	100%	1.219.000.000	100%	1.292.140.000	100%	1.369.668.400	100%	1.451.848.504	100%	5.332.656.904	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah
			4.01.03.00.59.05	Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui Analisa Kemiskinan	Output : Jumlah Evaluasi, Pengawasan dan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan	---	---	0	17 Kab/Kota	180.000.000	17 Kab/Kota	190.800.000	17 Kab/Kota	202.248.000	17 Kab/Kota	214.382.880	68 Kab/Kota	787.430.880	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah
			4.01.03.00.59.07	Optimalisasi Dewan Pengupahan di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan	Output : Jumlah Evaluasi, Pengawasan dan Koordinasi Dewan Pengupah Kab/Kota	---	---	0	17 Kab/Kota	180.000.000	17 Kab/Kota	190.800.000	17 Kab/Kota	202.248.000	17 Kab/Kota	214.382.880	68 Kab/Kota	787.430.880	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah
			4.01.03.00.59.09	Kegiatan Penguatan Kelembagaan TP-UKS dan Tim Pembina Sekolah Sehat di Sumatera Selatan	Output : Jumlah Evaluasi, Pengawasan, dan Pembinaan Kelembagaan TP-UKS	---	---	0	17 Kab/Kota dan 1 Dokumen Pembinaan	479.000.000	17 Kab/Kota dan 1 Dokumen Pembinaan	507.740.000	17 Kab/Kota dan 1 Dokumen Pembinaan	538.204.400	17 Kab/Kota dan 1 Dokumen Pembinaan	570.496.664	68 Kab/Kota dan 4 Dokumen Pembinaan	2.095.441.064	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah
			4.01.03.00.59.11	Rakor Kesra se-Sumsel	Output : Rumusan Rekomendasi/Laporan/Bahan Kebijakan	---	---	0	1 Dokumen	380.000.000	1 Dokumen	402.800.000	1 Dokumen	426.968.000	1 Dokumen	452.586.080,00	4 Dokumen	1.662.354.080	Biro Kesra Setda Prov. Sumsel	Perangkat Daerah
			4.01.4.01.03	Program Peningkatan Kinerja BUMD	Outcome : Persentase BUMD yang memberikan kontribusi kepada PAD	100%	100%	672.275.750	85%	527.000.000	90	113.493.499	95	123.230.751	100	100.000.000	100	1.536.000.000	Biro Perekonomian	Palembang
			4.01.4.01.03.51.14	Pembinaan	Output : jumlah dokumen	1	1	177.894.500	1	150.000.000	1	63.233.749	1	68.226.751	1	50.000.000	5	509.355.000	Biro	17 kab/kota

				dan Pengawasan BUMD di Sumatera Selatan	data perkembangan 15 BUMD di Sumatera Selatan	dokumen	dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen	Perekonomian	se-Sumsel dan Luar Provinsi	
			4.01.4.01.03.51.16	Audit terhadap BUMD yang bermasalah	Output : Menyediakan data audit BUMD di Sumatera Selatan	3 buku laporan audit	3 buku laporan audit	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-	3 buku laporan audit	150.000.000	Biro Perekonomian	17 kab/kota se-Sumsel dan Luar Provinsi	
			4.01.4.01.03.51.17	Pembuatan Naskah Akademik BUMD	Output : Menyediakan naskah akademik BUMD Sumatera Selatan	1 BUMD	1 BUMD	166.425.250	-	-	-	-	-	-	-	1 BUMD	166.425.250	Biro Perekonomian	17 kab/kota se-Sumsel dan Luar Provinsi	
			4.01.4.01.03.51.00	Raperda Pembentukan dan Perubahan BUMD	Output : Jumlah Raperda BUMD	-	-	-	3 raperda	377.000.000	3 raperda	50.259.750	3 raperda	55.004.000	3 raperda	50.000.000	12 Raperda	532.263.750	Biro Perekonomian	17 kab/kota se-Sumsel dan Luar Provinsi
			4.01.4.01.03.51.xx	Sosialisasi PP 54 Tahun 2017 dan Permendagri No. 37 Tahun 2018	Output : Menyediakan Bahan sosialisasi PP 54 Tahun 2017 dan Permendagri No. 37 Tahun 2018 sebagai Pedoman BUMD Prov. Sumsel	34 BUMD Prov. Sumsel	34 BUMD Prov. Sumsel	177.956.000	-	-	-	-	-	-	-	34 BUMD Prov. Sumse 1	177.956.000	Biro Perekonomian	17 kab/kota se-Sumsel dan Luar Provinsi	
			4.01.4.01.03	Program Pembangunan Bidang Ekonomi	Outcome : Persentase Data Informasi Pembangunan Ekonomi yang Tersedia	100%	100%	480.000.000	100%	1.033.661.700	100%	605.254.200	100%	605.000.000	100%	635.084.100	100%	3.209.000.000	Biro Perekonomian	Palembang
			4.01.4.01.03.51.12	Pemantauan Evaluasi Program Lintas Sektoral Pelaksanaan Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) untuk peningkatan Akses Permodalan di Sumatera Selatan	Output : Jumlah Dokumen Data Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT) dari BPN bagi MBR (UKM, Petani, Nelayan)	1 Laporan	1 Laporan	95.000.000	-	-	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	75.000.000	4 Laporan	270.000.000	Biro Perekonomian	17 kab/kota se-Sumsel dan luar provinsi
			4.01.4.01.03.51.18	Percepatan Akses	Output : Jumlah dokumen data percepatan	1 dokumen	1 dokumen	95.000.000	1 dokumen	173.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokum	65.000.000	1 dokum	65.000.000	5 Doku	473.000.000	Biro Perekonomian	17 kab/kota se-Sumsel

				Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan	akses keuangan daerah							en		en		men		an	dan luar provinsi	
			4.01.4.01.03.51.11	Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Output : Tingkat Inflasi yang rendah dan stabil serta terjaganya harga barang dan jasa yang terjangkau untuk masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	100.000.000	Biro Perekonomian	17 kab/kota se-Sumsel dan luar provinsi	
			4.01.4.01.03.51.26	Identifikasi Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) wilayah Sumatera Selatan	Output : Jumlah dokumen data penyaluran KUR oleh Bank Penyalur kepada UMKM	-	-	-	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	85.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	4 dokumen	385.000.000	Biro Perekonomian	17 kab/kota se-Sumsel dan luar provinsi
			4.01.4.01.03.52.01	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan	Output : Terselenggaranya koordinasi penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan	20 Laporan	20 Laporan	95.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20 Laporan	95.000.000	Biro Perekonomian	17 kab/kota se-Sumsel dan luar provinsi	
			4.01.4.01.03.51.23	Identifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Wilayah Sumatera Selatan	Output : Jumlah dokumen data penyaluran pupuk bersubsidi Prov. Sumsel	-	-	-	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	70.000.000	4 dokumen	310.000.000	Biro Perekonomian	17 kab/kota se-Sumsel dan luar provinsi
			4.01.4.01.03.51.11	Koordinasi Pelaksanaan Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka mendukung Pertumbuhan	Output : Jumlah dokumen data pengendalian inflasi daerah yang dilakukan	-	-	-	1 Laporan	304.115.750	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	100.000.000	4 Laporan	704.115.750	Biro Perekonomian	17 kab/kota se-Sumsel dan luar provinsi

				n Ekonomi di Sumatera Selatan																
			4.01.4.01.03.51.28	Promosi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dalam Negeri	Output : Jumlah Pengembangan Investasi Promosi Produk dan Budaya Sumsel	-	-	-	2 Pameran	306.545.950	2 Pameran	100.000.000	2 Pameran	150.000.000	2 Pameran	200.000.000	8 Pameran	756.545.950	Biro Perekonomian	Dalam Negeri
			4.01.4.01.03.xx.xx	Identifikasi Pelaksanaan CSR PKBL untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Sumatera Selatan	Output : Melaksanakan Identifikasi Pelaksanaan CSR PKBL untuk Peningkatan Perekonomian Masyarakat di Sumatera Selatan	20 Laporan	20 Laporan	95.000.000	-	-	20 Laporan	70.254.200	20 Laporan	50.000.000	20 Laporan	50.084.100	80 Laporan	265.338.300	Biro Perekonomian	17 kab/kota se-Sumsel dan luar provinsi
			4.01.03.00.49	Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Outcome :Persentase Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	100%	100%	2.550.000.000	100%	1.990.000.000	100%	2.125.000.000	100%	2.175.000.000	100%	2.450.000.000	100%	11.290.000.000	Biro Administrasi Pembangunan	
			4.01.03.00.49.09	Koordinasi Pelaksanaan Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)	Output : Jumlah dokumen hasil evaluasi TEPRA	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	350.000.000	1 dokumen	400.000.000	5 dokumen	1.600.000.000	Biro Administrasi Pembangunan	prov/kab/kota
			4.01.03.00.49.10	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus.	Output : Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dekonsentrasi dan Dana Alokasi Khusus	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	250.000.000	5 dokumen	1.075.000.000	Biro Administrasi Pembangunan	prov/kab/kota
			4.01.03.00.49.17	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Vertikal dan Non Vertikal	Output : Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Vertikal dan Non Vertikal	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	5 dokumen	875.000.000	Biro Administrasi Pembangunan	prov/kab/kota
			4.01.03.00.49.18	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi	Output : Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dana APBD Bidang Sosial Budaya dan	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	210.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	250.000.000	5 dokumen	910.000.000	Biro Administrasi Pembangunan	prov/kab/kota

				Pembangunan Dana APBD Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat.	Kesejahteraan Rakyat.														
		4.01.03.00.49.19	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dana APBD Bidang Perekonomian.	Output :Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dana APBD Bidang Perekonomian.	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	210.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	250.000.000	5 dokumen	910.000.000	Biro Administrasi Pembangunan	prov/kab/kota
		4.01.03.00.49.20	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dana APBD Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.	Output :Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Dana APBD Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah.	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	300.000.000	5 dokumen	1.000.000.000	Biro Administrasi Pembangunan	prov/kab/kota
		4.01.03.00.49.21	Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan.	Output : Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	210.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	250.000.000	1 dokumen	300.000.000	5 Dokumen	1.085.000.000	Biro Administrasi Pembangunan	prov/kab/kota
		4.01.03.00.49.22	Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi (P4 Air Minum dan Sanitasi)	Output : Jumlah dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Program Pembangunan Perumahan Permukiman Air Minum dan Sanitasi (P4 Air Minum dan Sanitasi)	0	0	0	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	250.000.000	5 Dokumen	850.000.000	Biro Administrasi Pembangunan	prov/kab/kota
		4.01.03.00.49.23	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Tugas Pembantuan	Output : Jumlah Dokumen hasil Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Tugas Pembantuan	1 dokumen	1 dokumen	0	1 dokumen	210.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	225.000.000	1 dokumen	250.000.000	5 Dokumen	910.000.000	Biro Administrasi Pembangunan	prov/kab/kota
		4.01.03.00.49.24	Pembinaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Output : Persentase pengadaan barang/jasa OPD (690 paket lelang; 7 kali diklat,bimtek,sosialisasi; konsultasi ke jkt; 3 kali rapat koordinasi)	100%	1 Dokumen	2.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	2.000.000.000	Biro Administrasi Pembangunan	OPD Prov
		4.01.03.00.49.xx	Pembinaan dan Pengendalian	Output : Jumlah dokumen pembinaan dan pengendalian Administrasi pembangunan	1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	75.000.000	Biro Administrasi Pembangunan	prov/kab/kota

				Administrasi Pembangunan Desentralisasi	Desentralisasi														an	
			4.01.03.00.49	Program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Outcome :Persentase Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	100%	100%	2.756.100.000	100%	3.448.600.000	100%	8.595.262.115	100%	9.095.262.115	100%	9.595.262.115	100%	33.490.486.345	Biro Barang dan Jasa	
			4.01.03.00.49	Penyusunan LAKIP perangkat Daerah/ DID Kinerja SAKIP	Outcome : Persentase Bimbingan Teknis SAKIP	-	-	0	-	26.600.000	-	26.600.000	-	26.600.000	-	26.600.000	-	106.400.000	Biro Barang dan Jasa	OPD
			4.01.03.00.49.24	Pembinaan Layanan pengadaan Barang/jasa	Output : Persentase koordinasi yang dilaksanakan	-	600 paket	2.756.100.000	600 paket	3.422.000.000	600 paket	8.568.662.115	600 paket	9.068.662.115	600 paket	9.568.662.115		33.384.086.345	Biro Barang dan Jasa	OPD
			4.01.03.00.26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penetapan Peraturan per Undang-Undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	395.000.000	100%	350.000.000	100%	650.000.000	100%	750.000.000	100%	850.000.000	100%	2.995.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.26.08	Penataan Organisasi Perangkat Daerah Prov. Sumsel	Output : Ditetapkan Perda Organisasi Perangkat Daerah	49 PD	49 PD	185.000.000	49 PD	125.000.000	49 PD	100.000.000	49 PD	100.000.000	49 PD	100.000.000	49 PD	610.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.26.09	Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta Penataan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Prov. Sumsel	Output : Ditetapkan Pergub Uraian Tugas dan Fungsi serta UPTD	49 PD	49 PD	85.000.000	49 PD	125.000.000	49 PD	250.000.000	49 PD	300.000.000	49 PD	350.000.000	49 PD	1.100.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.26.23	Pembinaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kab./Kota se-Sumsel	Output : Perangkat Daerah dan UPTD Kabupaten/Kota Sesuai dengan Peraturan	49 PD dan 17 Kab/Kota	49 PD dan 17 Kab/Kota	125.000.000	49 PD dan 17 Kab/Kota	100.000.000	49 PD dan 17 Kab/Kota	300.000.000	49 PD dan 17 Kab/Kota	350.000.000	49 PD dan 17 Kab/Kota	400.000.000	49 PD dan 17 Kab/Kota	1.275.000.000	Biro Organisasi	Palembang

			4.01.03.00.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur/PNS/Anggota KORPRI	Outcome : Persentase Aparatur yang Dibina dan Dikembangkan	100%	100%	2.972.908.000	100%	2.000.000.000	100%	2.810.000.000	100%	2.855.000.000	100%	3.050.000.000	100%	13.687.908.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.30.71	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Setda Prov. Sumsel	Output : Jumlah ASN yang Mendapat Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	9 Biro	9 Biro	100.000.000	9 Biro	100.000.000	9 Biro	150.000.000	9 Biro	175.000.000	9 Biro	200.000.000	9 Biro	725.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.30.91	Rekonsiliasi dan Validasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan	Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimteks Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan	NA	49 PD	996.220.000	49 PD	250.000.000	49 PD	500.000.000	49 PD	500.000.000	49 PD	500.000.000	49 PD	2.746.220.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.30.92	Bimbingan Teknis Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta Evaluasi Jabatan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Sumsel.	Output : Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimteks Anjab, ABK dan Evaluasi Jabatan	NA	49 PD	480.000.000	49 PD	250.000.000	49 PD	525.000.000	49 PD	550.000.000	49 PD	575.000.000	49 PD	2.380.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.30.85	Pembinaan Capaian	Output : Jumlah Laporan IKU Berbasis Informatika	1 Dok	1 Data Input	50.000.000	1 Data Input	75.000.000	1 Data Input	80.000.000	1 Data Input	85.000.000	1 Data Input	90.000.000	1 Data Input	380.000.000	Biro Organisasi	Palembang

				Indikator Kinerja Utama yang berbasis Informatika			OPD		OPD		OPD		OPD		OPD		OPD			
			4.01.03.00.30.86	Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi Pemprov Sumsel 2019-2023	Output : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	49 PD dan 17 Kab/Kota	49 PD dan 17 Kab/Kota	371.688.000	49 PD dan 17 Kab/Kota	275.000.000	49 PD dan 17 Kab/Kota	300.000.000	49 PD dan 17 Kab/Kota	325.000.000	49 PD dan 17 Kab/Kota	350.000.000	49 PD dan 17 Kab/Kota	1.621.688.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.30.87	Pembinaan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumsel	Output : Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur	1 Dokumen	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	175.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	785.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.30.88	Pembinaan dan Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi dan Kab./Kota se-Sumsel	Output : Jumlah Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	250.000.000	17 Kab/Kota	200.000.000	17 Kab/Kota	300.000.000	17 Kab/Kota	350.000.000	17 Kab/Kota	400.000.000	17 Kab/Kota	1.500.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.30.89	Pelaksanaan Budaya Kerja Aparatur di Lingkungan Pemrov. Sumsel	Output : Meningkatkan penerapan nilai-nilai Budaya Kerja terhadap ASN Pemprov. Sumsel	9 Biro	9 Biro	100.000.000	9 Biro	100.000.000	9 Biro	150.000.000	9 Biro	160.000.000	9 Biro	165.000.000	9 Biro	705.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.30.94	Sosialisasi Peraturan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemrov Sumsel	Output : Pengembangan Sistem dan Prosedur Kerja ASN	-	-	150.000.000	49 PD dan 17 Kabupaten/Kota	150.000.000	49 PD dan 17 Kabupaten/Kota	150.000.000	49 PD dan 17 Kabupaten/Kota	-	-	-	49 PD dan 17 Kabupaten/Kota	450.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.30.95	Fasilitasi Pelayanan	Output : Terfasilitasi Layanan Konsultasi	NA	NA	0	49 PD dan 17	100.000.000	49 PD dan 17	100.000.000	49 PD dan 17	100.000.000	49 PD dan 17	100.000.000	49 PD dan 17	400.000.000	Biro Organisasi	Palembang

				Rumah Inovasi untuk Peningkatan Pelayanan Publik yang Berkualitas di Provinsi Sumsel	Inovasi Pelayanan Publik Perangkat Daerah di Provinsi dan 17 Kabupaten/Kota				Kab/Kota		Kab/Kota		Kab/Kota		Kab/Kota		Kab/Kota			
			4.01.03.00.16.29	Penyelenggaraan Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI) Komisariat Wilayah Sumatera Selatan	Output : Terpenuhinya iuran wajib Sekda Provinsi Sumatera Selatan untuk FORSESDASI	12 bulan	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	0	0	0	0	0	0	12 bulan	40.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.16.xx	Iuran Tahunan Anggota FORSESDASI (Forum Sekretaris Daerah eluruh Daerah) Provinsi Sumsel	Output : Terpenuhinya iuran wajib Sekda Provinsi Sumatera Selatan untuk FORSESDASI	0	0	0	0	0	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	60.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.30.90	Penyempurnaan Aplikasi e-performance	Output : Jumlah aplikasi e-performance yang disempurnakan	1 Perangkat	1 Perangkat	50.000.000	1 Perangkat	75.000.000	1 Perangkat	100.000.000	1 Perangkat	125.000.000	1 Perangkat	150.000.000	1 Perangkat	500.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.30.xx	Pembangunan Sistim Pelayanan Publik melalui e-SKM	Output : Jumlah Aplikasi yang tersedia	1 Perangkat	1 Perangkat	200.000.000	1 Perangkat	225.000.000	1 Perangkat	250.000.000	1 Perangkat	275.000.000	1 Perangkat	300.000.000	1 Perangkat	1.250.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.30.xx	Sosialisasi dan penerapan e-SKM berbasis	Output : Jumlah ASN yang Mengikuti Sosialisasi	NA	60 Orang	75.000.000	60 Orang	80.000.000	60 Orang	85.000.000	60 Orang	90.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	430.000.000	Biro Organisasi	Palembang

				Web Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan																
			4.01.03.00.xx	Pengelolaan dan Pendataan administrasi kepegawaian di lingkungan setda Provinsi Sumsel	Output : Persentase dokumen administrasi kepegawaian meningkat	100%	80%	100.000.000	85%	100.000.000	90%	100.000.000	95%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	500.000.000	Biro Organisasi	Palembang
			4.01.03.00.16	Program Dukungan Penguatan Peran dan Kompetensi Staf Ahli KDH dalam Dukungan Tugas dan Fungsi KDH	Outcome : Terpenuhinya iuran wajib Sekda Provinsi Sumatera Selatan untuk FORSESDASI	100%	100%	2.000.000.000	100%	10.000.000.000	100%	6.000.000.000	100%	5.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%	25.000.000.000		
			4.01.03.03.16.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana penunjang acara/kegiatan KDH/WKDH	Output : Jumlah acara/kegiatan KDH/WKDH Pemprov. Sumsel	6 acara	6 acara	2.000.000.000	8 acara	10.000.000.000	10 acara	6.000.000.000	12 acara	5.000.000.000	14 acara	2.000.000.000	50 acara	25.000.000.000	Biro Umum dan Perlengkapan	Palembang
			4.01.03.xx	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (DID Perencanaan terbaik)	Outcome : persentase aparatur yang meningkat kualitasnya	-	100%	71.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.450.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang
			4.01.03.02.03.xx	Kegiatan Benchmarking Perencanaan Pembangunan	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti benchmarking	-	3 orang	30.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.750.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang

				an Perangkat Daerah																
			4.01.03.02.03.xx	Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti capacity building	-	3 orang	40.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40.700.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang	
			4.01.03.xx	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (DID SAKIP dengan nilai A)	Outcome : persentase aparatur yang meningkat kualitasnya	-	100%	49.450.000	-	-	-	-	-	-	-	49.450.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang		
			4.01.03.02.03.xx	Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti benchmarking	-	3 orang	25.750.000	-	-	-	-	-	-	-	3 orang	25.750.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang	
			4.01.03.02.03.xx	Kegiatan Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah	Output : Jumlah aparatur yang mengikuti bimbingan teknis SAKIP	-	3 orang	23.700.000	-	-	-	-	-	-	-	3 orang	23.700.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang	
			2.06.4.01.03.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Outcome : Persentase Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	100%	100%	10.500.000.000	100%	15.500.000.000	100%	17.050.000.000	100%	16.575.000.000	100%	15.100.000.000	100%	74.725.000.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang
			2.06.4.01.03.16.02	Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja/Fasilitasi Tamu-tamu Pimpinan	Output : Jumlah Penerimaan Kunjungan Kerja/Fasilitasi Tamu-tamu Pimpinan	150 kali	150 kali	3.500.000.000	175 kali	5.000.000.000	200 kali	5.500.000.000	200 kali	5.000.000.000	200 kali	24.000.000.000	24.000.000.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang	
			2.06.4.01.03.16.05	Kegiatan	Output : Jumlah	50	50	3.500.000.000	50	5.000.000.000	100	5.500.000.000	100	5.000.000.000	100	24.500.000.000	24.500.000.000	BIRO	Palembang	

				Kunjungan Kerja /Inspeksi Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH)	kunjungan kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	kunker	kunker		kunker		kunker		kunke r		kunke r		kunke r		HUMAS DAN PROTOKOL	
			2.06.4.01.03.16.11	Kegiatan Pelaksanaan Silaturahmi KDH/WKDH Provinsi Sumatera Selatan	Output : Jumlah silaturahmi KDH/WKDH Provinsi Sumatera Selatan	30 kali	30 kali	3.000.000.000	30 kali	5.000.000.000	50 kali	5.500.000.000	50 kali	5.500.000.000	30 kali	4.500.000.000	50 kali	23.500.000.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang
			2.06.4.01.03.16.27	Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Keprotokolan Se-Sumsel	Output : Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Keprotokolan Se-Sumatera Selatan	85 orang	85 orang	500.000.000	85 orang	500.000.000	85 orang	550.000.000	85 orang	575.000.000	85 orang	600.000.000	85 orang	2.725.000.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang
			4.01.4.01.03.56	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Outcome : Persentase Kualitas Komunikasi dan Informasi	100%	100%	25.011.889.000	100%	39.850.000.000	100%	40.650.000.000	100%	40.300.000.000	100%	44.700.000.000	100%	190.511.889.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang
			4.01.4.01.03.56.01	Kegiatan Dokumentasi dan Kliping	Output : Jumlah Dokumentasi/Kliping	1000 dokumen	1000 dokumen	150.000.000	1000 dokumen	350.000.000	1000 dokumen	450.000.000	1000 dokum en	500.000.000	1000 dokum en	500.000.000	1000 dokum en	1.950.000.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang
			4.01.4.01.03.56.02	Kegiatan Penerbitan Informasi Pembangunan	Output : Jumlah Cetakan Informasi Pembangunan	5 Edisi	5 Edisi	2.500.000.000	5 Edisi	4.500.000.000	5 Edisi	4.750.000.000	5 Edisi	5.000.000.000	5 Edisi	5.500.000.000	5 Edisi	22.250.000.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang
			4.01.4.01.03.56.16	Kegiatan Pembinaan Kemitraan Media dan Pers	Output : Jumlah Kegiatan Pembinaan Kemitraan Media dan Pers	-	15 kali	1.500.000.000	15 kali	2.000.000.000	15 kali	2.000.000.000	17 kali	250.000.000	17 kali	2.750.000.000	17 kali	8.500.000.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang
			4.01.4.01.03.56.04	Kegiatan Pembuatan dan Penayangan Informasi	Output : Jumlah Iklan Layanan Masyarakat yang tersedia	3 tema	3 tema	120.000.000	3 tema	1.800.000.000	3 tema	2.000.000.000	3 tema	2.500.000.000	3 tema	3.000.000.000	3 tema	9.420.000.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang

				Layanan Masyarakat																
			4.01.4.01.03.56.05	Kegiatan Publikasi Media Cetak dan Media Elektronik	Output : Jumlah Media Lokal, Nasional dan Mingguan	101 media	101 media	17.841.889.000	101 media	27.000.000.000	101 media	27.000.000.000	101 media	27.000.000.000	101 media	27.500.000.000	101 media	126.341.889.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang
			4.01.4.01.03.56.06	Kegiatan Peliputan Kunjungan Kerja KDH/WKDH dan Penerimaan Kunjungan Kerja/Fasilitasi Tamu-tamu Pimpinan	Output : Jumlah liputan Kegiatan Kunjungan Kerja KDH/WKDH dan Penerimaan Kunjungan Kerja/Fasilitasi Tamu-tamu Pimpinan	350 kali	350 kali	1.500.000.000	350 kali	2.000.000.000	350 kali	2.000.000.000	350 kali	2.350.000.000	350 kali	2.500.000.000	350 kali	10.350.000.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang
			4.01.4.01.03.56.12	Kegiatan Pembuatan dan Penayangan Video Profil	Output :Jumlah Video	1 Video	1 Video	1.000.000.000	1 Video	1.500.000.000	1 Video	1.750.000.000	1 Video	2.000.000.000	1 Video	2.200.000.000	1 Video	8.450.000.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang
			4.01.4.01.03.56.14	Kegiatan Pengumpulan dan Penyaringan Informasi	Output : Jumlah Buku PPI, Kunker dan Pidato Gubernur	3 Jenis buku	3 Jenis buku	200.000.000	3 Jenis buku	350.000.000	3 Jenis buku	350.000.000	3 Jenis buku	350.000.000	3 Jenis buku	375.000.000	3 Jenis buku	1.625.000.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang
			4.01.4.01.03.56.16	Kegiatan Penguatan Kelembagaan PPID Pembantu SKPD	Output : Jumlah Kelembagaan PPID	5 Jenis	5 Jenis	200.000.000	5 Jenis	350.000.000	5 Jenis	350.000.000	5 Jenis	350.000.000	5 Jenis	375.000.000	5 Jenis	1.625.000.000	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL	Palembang

BAB VII
KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Setda Prov. Sumsel yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD bertujuan untuk memberi gambaran tentang sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah khususnya dalam urusan perencanaan pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator hasil (outcome) program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD Provinsi Sumatera Selatan (2023) dapat dicapai. Pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023, indikator kinerja daerah dibagi atas tiga aspek, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Dari ketiga aspek tersebut, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Setda Provinsi Sumatera Selatan fokus pada pelaksanaan indikator kinerja pada aspek pelayanan umum terdiri atas sektor pembangunan yang menjadi Penunjang urusan pemerintahan. Penunjang urusan Pemerintahan dimaksud terdiri atas penelitian dan pengembangan. Adapun capaian dari setiap indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.1. berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja yang menggambarkan ke RPJMD

Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Awal kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	
		2019	2020	2021	2022	2023		
		target	target	target	target	target		
(1)		(3)					(4)	(5)
Pelayan Umum								
	Penunjang Urusan Pemerintah							
	Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik							
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22	22	80%	85%	90%	95%	100%
2	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	45%	-	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45%	-	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	80%	90%	95%	95%	100%	100%

5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
6.	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga perwakilan Rakyat Daerah	85,32	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	82,77	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Program Penataan Daerah Otonom Baru	96,25	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9.	Program Kerjasama Wilayah Perbatasan	91,18	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.	45%	-	100%	100%	100%	100%	100%
12.	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.	0	-	100%	80%	85%	90%	95%
13.	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.	0%	-	100%	100%	100%	100%	100%
14.	Persentase Data Informasi Pembangunan Ekonomi yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15.	Persentase BUMD yang Memberikan Kontribusi Kepada PAD	70%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat							
16.	Meningkatnya Peringkat MTQ	21 Besar	-	20 Besar	-	15 Besar	-	15 Besar
17.	Meningkatnya Peringkat STQ	-	20 Besar	-	15 Besar	-	15 Besar	15 Besar

BAB VIII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada 5 (lima) tahun kedepan dalam upaya membantu pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Semoga Allah SWT meridhoi semua niat baik kita, sehingga semua program kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan di tetapkan dan semoga RENSTRA ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan kita semua.

Akhir kata selaku Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta tim penyusun, mohon kritik dan saran dalam rangka mempermudah dan mempercepat pencapaian VISI dan Misi Pembangunan kepala Daerah terpilih periode Tahun 2018-2023 Pembangunan Kota dimaksud.

Palembang, 2019

a.n. **GUBERNUR SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS DAERAH,**



H. NASRUN UMAR
Pembina Utama (IV/e)
NIP.196206111989031012